

Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI dan Polri Menjadi Komisaris

di Badan Usaha Milik Negara



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

OLEH :

Ahmad Wahyudi

10400117096

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Wahyudi
NIM : 10400117096
Tempat/Tgl.Lahir : Biring Balang, 19 Juni 1999
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Kr.Makkawari
Judul : Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI dan Polri
Menjadi Komisaris di BUMN

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Gowa, 13 Juli 2021

Penyusun,



Ahmad Wahyudi

NIM : 10400117096

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak”** yang di susun oleh Siti Novriannisya NIM 10400117124, mahasiswa jurusan ilmu hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan di pertanggungjawabkan pada sidang *Munaqasyah* yang di selenggarakan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dan di nyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Muammar Muh. Bakry, Lc., M.Ag (.....)	
Sekretaris	: Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Andi Safriani, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Istiqama, S.H., M.H.	(.....)
Penguji I	: Erlina, S.H., M.H	(.....)
Penguji II	: Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H	(.....)

Diketahui Oleh :

 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar



 H. Muammar Muhammad Bakri,

Lc., M.Ag.

NIP : 19731122 20012 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang berkuasa atas bumi, langit, seluruh isinya. Sebab atas ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara**

Tak lupa jua penulis sampaikan salam dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan ummat beliau.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Proses penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari proses pengumpulan literatur hingga penulisannya sendiri. Serta tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan study Strata 1 (S1) di salah satu universitas Islam di Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak **Dr. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak **Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H** selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sekaligus dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan banyak masukan serta arahan selama penulis menempuh akademik di UIN Alauddin Makassar
4. Bapak **Abd. Rais Asmar, S.H., M.H.** selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. Ibu **Dr. Andi Safriani, S.H., M.H** sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, saran yang berguna serta meluangkan waktu hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Ibu **Istiqama, S.H., M.H** sebagai dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, segenap pemikirannya, saran serta kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap dosen serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Kedua orang tua dan keluarga, terima kasih yang tidak terhingga untuk dukungan serta doa kepada penulis agar tetap semangat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan sehingga tugas akhir ini bisa selesai tepat pada waktunya. Terima kasih juga karena tidak pernah bosan untuk menasihati serta selalu mengapresiasi setiap usaha penulis. Untuk ibunda tercinta, terima kasih atas mantra terampuh, yaitu doa yang dimana hal itu merupakan sumber kemudahan, keberhasilan dan sumber tenaga bagi penulis yang tidak akan bisa penulis dapatkan dimanapun. Untuk ayahanda tercinta, terima kasih atas tetesan keringat yang menjalar dan mengalir dalam tubuh penulis. Dan yang terakhir untuk semua keluarga, terima kasih untuk semuanya dan terima kasih karena selalu ada.
9. Untuk Siti Novriannisya, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mendampingi, selalu menyemangati dan menjadi teman terdekat untuk berbagi keluh-kesah, membantu menemukan solusi dari setiap persoalan dan sekaligus sumber semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga karena tidak pernah bosan memberi arahan dan motivasi tentang tujuan yang penulis akan capai. Terima kasih sekali lagi untuk jasa-jasa yang tidak akan pernah penulis lupakan.
10. Untuk teman-teman kelas di Ilmu Hukum-C 2017 yang telah menjadi teman sekelas dan teman diskusi selama kurang lebih empat tahun semasa berkuliah di UIN Alauddin Makassar, terima kasih untuk pengalaman luar biasanya.
11. Teman-teman angkatan Ilmu Hukum 2017
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih yang tak

terhingga untuk bantuan, dukungan, dan pengertiannya yang sangat tulus. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa daan budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga skripsi ini bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Negara yang kita cintai ini. Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna melengkapi skripsi ini.

Gowa, 13 Juli 2021

Ahmad Wahyudi



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	6
D. <i>Kajian Pustaka</i>	7
E. <i>Metode Penelitian</i>	8
F. <i>Tujuan dan kegunaan penelitian</i>	11
BAB II	13
KAJIAN UMUM TENTANG ASN, TNI DAN POLRI.....	13
A. <i>Definisi ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI (Tentara Republik Indonesia) daniPolri Polisi Republik Indonesia</i>	13
1. Definisi ASN (Aparatur Sipil Negara).....	13
2. Definisi Tentara Nasional Indonesia (TNI)	14
3. Definisi Polisi Republik Indonesia (Polri).....	15
B. <i>Kedudukan, Hak-hak dan Kewajiban ASN, TNI, Polri</i>	17
1. Kedudukan, Hak-hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN)	17
2. Kedudukan, Hak-hak dan Kewajiban Tentara Nasional Indonesia (TNI)	23
3. Kedudukan, Hak-hak dan Kewajiban Polisi Republik Indonesia	28
C. <i>Kode Etik ASN, TNI dan Polri Serta Sanksi Atas Pelanggarannya</i>	32
1. Kode Etik Aparatur Sipil Negara.....	32
2. Kode Etik Tentara Nasional Indonesia	35
3. Kode Etik Polisi Republik Indonesia.....	40
D. <i>Rangkap Jabatan</i>	41
1. Definisi Rangkap Jabatan ASN, TNI dan Polri.....	41
2. Konflik Kepentingan ASN, TNI dan POLRI.....	43
BAB III.....	46

KAJIAN TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA	46
<i>A. Defenisi Badan Usaha Milik Negara</i>	<i>46</i>
<i>B. Fungsi Badan Usaha Milik Negara</i>	<i>48</i>
<i>C. Latar Belakang Pembentukan Badan Usaha Milik Negara.....</i>	<i>49</i>
<i>D. Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Negara.....</i>	<i>52</i>
BAB IV	55
PROBLEMATIKA RANGKAP JABATAN ASN, TNI, DAN POLRI MENJADI KOMISARIS DI BADAN USAHA MILIK NEGARA	55
<i>A. Pertimbangan Diangkatnya ASN, TNI dan Polri Menjadi Komisaris BUMN di Indonesia</i>	<i>55</i>
<i>B. Akibat Hukum Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris BUMN.....</i>	<i>71</i>
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
<i>A. Kesimpulan.....</i>	<i>77</i>
<i>B. Saran</i>	<i>78</i>
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
RIWAYAT HIDUP	88

ABSTRAK

Nama : Ahmad Wahyudi

NIM : 10400117096

**Judul : Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi
Komisaris di BUMN**

Rangkap jabatan berangkat dari kata kerja “rangkap” yang diartikan sebagai “ganda”, yang jika dimaknai secara luas menjadi “merangkap” yang berarti menduduki jabatan lain selain jabatan tetap; terdapat lebih dari satu pekerjaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rangkap jabatan ialah perbuatan atau kehendak seseorang untuk menduduki dua atau lebih jabatan dalam pemerintahan atau organisasi. Tercatat sebanyak 124 komisaris BUMN yang merangkap jabatan, contohnya Laksdya TNI Achmad Djamaluddin yang awalnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Wantannas kemudian merangkap jabatan menjadi Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah : 1) Untuk mengetahui pertimbangan diangkatnya ASN, TNI dan Polri menjadi komisaris BUMN; 2) Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari jabatan rangkap ASN, TNI, dan Polri menjadi komisaris BUMN.

Dalam menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni membandingkan regulasi terkait dengan su hukum yang dimaksud. Data diperoleh melalui riset pustaka dari beberapa literatur, seperti buku, pendapat para sarjana dan ahli hukum, koran dan majalah, serta artikel terkait dengan permasalahan. Kemudian menganalisis data tersebut menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa pertimbangan diangkatnya ASN, TNI dan Polri menjadi komisaris BUMN adalah tidak adanya aturan yang secara eksplisit melarang hal tersebut. Artinya, konflik kepentingan dari rangkap jabatan dimungkinkan tidak akan terjadi. Namun ada beberapa aturan yang dapat dijadikan pertimbangan terkait rangkap jabatan tersebut. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari diangkatnya ASN, TNI dan Polri sebagai Komisaris di BUMN, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar, pihak terkait harus diberhentikan atau mengundurkan diri dari jabatannya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melihat kembali peraturan-peraturan yang mengizinkan dan melarang rangkap jabatan dan kemudian merevisinya. Apakah rangkap jabatan diperbolehkan atau tidak? Selanjutnya ASN, TNI dan Polri sebagai pejabat publik dan penyelenggara pelayanan publik yang menduduki posisi komisaris BUMN sebaiknya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Rangkap Jabatan, Konflik Kepentingan, BUMN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkara rangkap jabatan ialah hal yang sudah cukup lumrah dalam berbangsa dan bernegara, namun tetap tidak bisa sepenuhnya diterima keberadaannya bahkan lebih banyak mendapatkan penolakan dikarenakan banyak faktor, misalnya dapat menimbulkan konflik kepentingan, terjadinya rangkap penghasilan, lemahnya pengawasan dan lain sebagainya. Namun terlepas dari itu beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan agustus tahun 2020 ketika Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang telah mengangkat dan menetapkan sejumlah komisaris di BUMN yang diketahui dan tercatat ada beberapa nama yang merangkap jabatan mengatakan bahwasanya dia menekankan aspek kapabilitas dalam memilih komisaris tersebut.

Jabatan ialah sebuah titipan dan pemberian dari Allah swt kepada orang-orang tertentu. Jabatan biasanya dentik dengan kepemimpinan, kekuasaan, ketenaran, kehormatan, dan kekayaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kebanyakan orang bersaing memperebutkan posisi yang diinginkan. Mereka dapat bersaing dalam banyak hal bahkan menghalalkan segala cara.

Jabatan memiliki kesamaan dengan kepemimpinan merupakan tugas yang sangat mulia. Jabatan (kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemashlahatan hidup. jma para ulama telah disepakati hukum wajibnya mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tuga kepemimpinan (jabatan) di kalangan umat slam.¹

Jabatan bisa juga dianggap sebagai ujian, karena dengan adanya jabatan tersebut tentunya akan dimintai pertanggungjawaban yang tidak hanya pertanggungjawaban di dunia melainkan di akhirat juga. Seperti yang tertuang dalam hadits Nabi Muhammad saw.,

¹ Al-Mawardi, *al Ahkam al-Sulthaniyyah*, alih bahasa Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, cet.2, Jakarta:Qisthi Pers, 2017, hal.9

:عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ
مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ
بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ.

Artinya :

Dari Abdullah, Rasulullah saw, bersabda: Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kepala keluarga adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia dimintai pertanggungjawaban terhadap keluarganya. stri adalah pemimpin di rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Dan pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap tugasnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya.²

Tanggung jawab sebagai pemimpin tidaklah mudah. Semakin tinggi jabatan seseorang makan sekain besar pula tanggung jawabnya. Semakin banyak orang yang a pimpin, maka tanggung jawab yang harus a tanggung semakin besar juga. Semua detail terkait kepemimpinannya akan ditanyakan. Oleh karena itu, jabatan akan didasarkan pada tanggung jawabnya. Namun resiko tinggi itu malah mendorong orang-orang tertentu untuk memegang posisi tersebut. Mereka akan melakukan segala kemungkinan untuk mewujudkan keinginan mereka. Apakah metode yang diterapkan sesuai dengan hukum, baik hukum positif maupun hukum Syariah atau malah bertentangan?

Penunjukan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komisaris BUMN seperti penunjukan Raden Hari Hikmat yang awalnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial di Kementerian Sosial, kemudian merangkap sebagai Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia , diyakini dapat menimbulkan konflik regulasi.³ Dimana sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Tata Tertib Pegawai Negeri Sipil melarang PNS merangkap jabatan

² Al-Bukhari, *Shaih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) : 4789

³ <https://www.katta.id/news/2020/07/06/7505/inilah-62-pejabat-asn-yang-rangkap-jabatan-komisaris-bumn>.

sebagai direksi dan komisaris perusahaan swasta. PP tersebut kemudian diubah menjadi PP Nomor 53 Tahun 2019 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa tidak adanya larangan PNS untuk menjadi komisaris sekaligus, kecuali menjadi anggota partai politik. Logika yang kemudian berkembang ialah tidak adanya larangan menjadi komisaris perusahaan swasta apalagi menjadi komisaris BUMN atau anak perusahaan yang berarti bahwa ASN akan diberikan kelonggaran yang setara dengan pegawai swasta.

Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN menunjukkan bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bisa berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah. Peraturan tersebut mengasumsikan bahwa ASN, TNI dan Polri bukanlah posisi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan bagi BUMN, sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Artinya, bahwa kebijakan tersebut mendukung rangkap jabatan apabila tidak menimbulkan benturan kepentingan. Di samping, Mohammad Mahfud MD secara tidak langsung mendukung adanya rangkap jabatan jika dalam kenyataan memang diperlukan, yaitu dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum di Indonesia menyatakan bahwasanya hukum dalam arti perundang-undangan tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem dalam kenyataan (*das sein*).⁴

Kemudian, kebijakan yang secara eksplisit melarang rangkap jabatan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 17 yang menyebutkan “pejabat pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Pejabat pelaksana pelayanan publik adalah pejabat yang bekerja di dalam

⁴ Mohammad Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers: Depok, 2018, hal. 9.

organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik dan ASN, TNI, Polri tentu termasuk di dalamnya.”

Dalam UU ASN, UU TNI, UU Polri khususnya UU Pelayanan Publik tercantum mengenai larangan masing-masing profesi dalam merangkap jabatan.

1. UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 17 menyebutkan pejabat pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD.
2. UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , dalam Pasal 28 ayat (3) yang berbunyi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
3. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia , khususnya Pasal 47 ayat (1) Prajurit han(1)ya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
4. Dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf (H) yang berbunyi agar ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Permasalahan rangkap jabatan ini, dalam catatan ombudsman, “bahwa ini bukan kali pertamanya terjadi rangkap jabatan di komisaris BUMN. Tahun 2019 telah tercatat sebanyak 397 komisaris ditemukan rangkap jabatan di BUMN belum lagi pada anak perusahaan BUMN mencapai 167 komisaris yang rangkap jabatan yang pastinya terindikasi rangkap penghasilan. Dari data yang ada, tercatat sebanyak 254 pejabat setingkat kementerian terhitung 64%, sebanyak 112 pejabat dari lembaga non kementerian atau sebanyak 28%, dan sebanyak 31 pejabat dari perguruan tinggi atau institusi (8%). Untuk instansi dari berbagai kementerian, tercatat lima kementerian yang mendominasi sebesar 58%, yakni sebanyak 55 orang di departemen BUMN, 42 orang di kementerian keuangan, di kementerian perhubungan dan PUPR tercatat masing-masing 17 orang. Dan

sekreteris negara sebanyak 16 orang. Untuk lembaga non kementerian tercatat sebanyak 65% yang dikuasai oleh lima instansi , yakni TNI (27 orang), POLRI (13 orang), Kejaksaan Agung (12 orang), Pemda (11 orang), BIN (10 orang) dan BPKP (10 orang), sedangkan untuk perguruan tinggi tercatat berasal dari 16 perguruan tinggi Indonesia , diantaranya Universitas Indonesia (9 orang), disusul Universitas Gadjahmada (5 orang).⁵

Selain itu, menteri BUMN, Erick Thohir menunjuk beberapa anggota aktif TNI-Polri sebagai komisaris BUMN, seperti Laksdya TNI Achmad Djamiluddin yang awalnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Wantannas kemudian merangkap jabatan menjadi Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia dan rjen Pol. Carlo Brix Tewu yang menjabat sebagai Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN merangkap menjadi Komisaris PT Bukit Asam.⁶ Penunjukan tersebut dimaksudkan agar anggota TNI-Polri dapat aktif dalam menangani BUMN ketika menghadapi konflik seperti sengketa tanah dan perizinan serta menangani kasus-kasus seperti penipuan keuangan. Masalah pengangkatan ini tentunya menuai problematik karena mengingat anggota TNI-Polri tersebut masih aktif menjabat di kementerian/lembaga negara lainnya.

Dengan diangkatnya komisaris BUMN yang merangkap jabatan dari berbagai lembaga misalnya TNI dan Polri selain ditakutkan akan menciptakan Dwi Fungsi ABRI yang sudah jelas melanggar UU TNI dan UU Polri juga akan menyebabkan masalah ketidak profesional menteri BUMN dalam proses rekrutmen calon komisaris sebab menciptakan ketidakpastian dalam proses dan prosedur dari rekrutmen tersebut. Dengan proses rekrutmen yang tertutup dan adanya rangkap jabatan yang dianggap telah berbenturan dengan beberapa aturan akan menciptakan hilangnya kepercayaan publik ataupun masyarakat terhadap BUMN karena dikhawatirkan adanya maladministrasi dalam proses tersebut, belumlah ditakutkan adanya permainan politik dan permainan dari golongan tertentu.

⁵ <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan-pada-2019>

⁶ <https://ir.binus.ac.id/2020/07/06/tni-polri-aktif-rangkap-jabatan-problematik>.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, maka rangkap jabatan tidak dapat dilandasi oleh alasan hukum yang formal, karena sebenarnya ada peraturan atau kebijakan lain yang membolehkan hal tersebut. Oleh karena itu, peraturan struktural perlu segera disusun untuk memperjelas apakah boleh atau tidaknya ASN, TNI dan Polri menjabat sebagai komisaris BUMN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun pokok masalah “Bagaimana Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI dan Polri Menjadi Komisaris BUMN?”. Agar tidak meluas maka pembahasan dibatasi dalam sub masalah di bawah ini :

1. Bagaimana pertimbangan diangkatnya ASN, TNI dan Polri menjadi komisaris BUMN?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari jabatan rangkap ASN, TNI, dan Polri menjadi komisaris BUMN?

C. Pengertian Judul

Berdasarkan paparan dalam latar belakang, adapun pengertian judul dalam penelitian Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris Badan Usaha Milik Negara antar lain :

1. Problematika berasal dari kata problem yang berarti permasalahan atau masalah. Secara umum yang dimaksud dengan Problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.
2. Rangkap Jabatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro.⁷
3. Aparatur Sipil Negara adalah profesi yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah yang tujuan utamanya menjadi pelayan masyarakat.

⁷ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia .

4. Tentara Nasional Indonesia adalah perangkat pertahanan nasional yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan dan keputusan dari negara.
5. Polisi Republik Indonesia adalah lembaga eksekutif yang diberi kewenangan menjaga keamanan Negara di wilayah NKRI dan melaksanakan tugasnya berlandaskan Undang-undang.
6. Komisaris adalah sekelompok orang yang memegang posisi tinggi dalam perusahaan atau organisasi dan ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
7. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang kepemilikannya sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh negara.⁸ Dalam hal ini yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia .

D. Kajian Pustaka

Agar pembahasan terfokus pada pokok kajian maka dilengkapi dengan beberapa sumber buku yang terdapat pandangan dari beberapa ahli yang berkaitan dengan rencana penelitian antara lain :

1. Moh. Mahfud MD, dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia . Dalam buku ini secara umum dibahas tentang pandangan tentang hukum yang ada di Indonesia , dimana hukum sebagai produk politik tidak selalu dapat menjamin kepastian hukum ataupun penjamin keadilan. Namun banyak peraturan hukum yang tumpul, tidak dapat memotong kesewenangan dan tidak mampu menegakkan keadilan. Meskipun secara langsung tidak membahas mengenai rangkap jabatan, tetapi dalam buku ini dituliskan mengenai jawaban dari persoalan-persoalan yang kaitannya dengan peraturan-peraturan yang berbenturan. Hal tersebut yang kemudian menjadi pembeda dari tulisan penulis. Dimana fokus peneltian penulis ialah terkait rangkap jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan tidak

⁸ Risky Firmansyah, Tinjauan Yuridis Pengaturan Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Atau Dewan Pengawas di BUMN (skripsi), Universitas Brawijaya, 2018

akan terlepas dari praktik-praktik politik. Oleh karena itu, literatur yang digunakan penulis mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagaimana keterkaitan hukum itu sendiri dengan politik dalam hal ini mengenai rangkap jabatan.

2. Abdul Manan, dalam bukunya *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Dalam buku ini menekankan bahwasanya kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah harus memperlihatkan pentingnya mematuhi aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kaitan sekaligus yang membedakan buku tersebut dengan penelitian penulis ialah penulis memfokuskan penelitian terkait rangkap jabatan yang kemudian dikaitkan dengan aspek-aspek hukum yang dimana dalam praktiknya masih terjadi ketidakjelasan dan praktik-praktik hukum yang merusak produk hukum itu sendiri. Kemudian kaitannya dengan rangkap jabatan ini, secara jelas dalam Undang-undang tentang ASN, TNI, Polri dan BUMN serta aturan lain melarang adanya rangkap jabatan tetapi dalam kenyataannya, di Negara Indonesia masih banyak terjadi rangkap jabatan khususnya yang menjabat sebagai komisaris BUMN. Sehingga buku ini diperlukan sebagai bahan literatur dalam melihat aspek-aspek hukum kemudian membandingkannya dengan problematika rangkap jabatan melalui pendekatan undang-undang atau pengkajian peraturan perundang-undangan yang ada.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti mengumpulkan data, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian dan lain sebagainya.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative atau penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan

perundang-undangan. Dalam penelitian ini sumber utama menggunakan bahan hukum yang tidak dari data/ fakta sosial sehingga dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.

Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada pemikiran bahwa penelitian ini hendak menganalisis tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode statute approach (Pendekatan perundang-undangan) dan conceptual approach (Pendekatan konseptual). Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi atau aturan yang terkait dengan su hukum yang ditangani,⁹ sedangkan pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ni, jenis dan sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier :

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan, seperti :

- a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

⁹ Peter Machmud, 2011, hal.93

- b. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- d. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- e. Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, yang terdiri dari atas buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini yakni tentang rangkap jabatan ASN, TNI, dan Polri menjadi komisaris di BUMN.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder itu sendiri. Seperti kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat penting karena dengan metode ini penulis dapat mendapatkan data yang sesuai atau berkaitan dengan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka yaitu memperoleh data dan informasi dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti dengan mempelajari perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu :

- a. Peneliti
- b. Laptop/Android
- c. Jaringan internet
- d. Alat tulis

6. Teknik pengelolaan dan Analisis Data

a. Teknik Pengelolaan Data

- 1) Melakukan seleksi terhadap data agar sesuai dengan topik penelitian tentang problematika rangkap jabatan ASN, TNI, dan Polri menjadi komisaris BUMN.
- 2) Klarifikasi data secara sistematis tentang problematika rangkap jabatan ASN, TNI, dan Polri menjadi komisaris BUMN.
- 3) Mengubah data kedalam fokus permasalahan sesuai dengan topik penelitian (Reduksi Data) tentang problematika rangkap jabatan ASN, TNI, dan Polri menjadi komisaris BUMN.
- 4) Editing data yaitu melakukan pemeriksaan data hasil penelitian agar mendapatkan data yang sesuai dengan literatur yang diperoleh.

b. Teknik Analisa Data

Metode atau teknik analisis data yang digunakan untuk dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu suatu teknik dalam menganalisis datanya berupa analisis tekstual yang berkualitas dan menekankan pada aspek teologis. Di mana penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik dengan cara kuantifikasinya.¹⁰

F. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperjelas dan memperluas pengetahuan hukum tentang rangkap jabatan ASN, TNI dan Polri sebagai komisaris di BUMN sesuai dengan pokok permasalahan dari poin B, antara lain:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan diangkatnya ASN, TNI dan Polri menjadi komisaris BUMN

¹⁰ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hal.10

- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari jabatan rangkap ASN, TNI, dan Polri menjadi komisaris BUMN

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris dalam memperkaya ranah ilmu hukum tata negara, terutama terkait dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru bagi peneliti dalam memahami Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN berdasarkan perundang-undangan yang mengaturnya.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan kajian bagi Pemerintah dalam mengevaluasi dan mengkaji, khususnya terkait Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN berdasarkan perundang-undangan yang mengaturnya.

3) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran komprehensif secara praktis, utamanya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri yang hendak merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG ASN, TNI DAN POLRI

A. Definisi ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI (Tentara Republik Indonesia) dan Polri Polisi Republik Indonesia

1. Definisi ASN (Aparatur Sipil Negara)

Sebutan Aparatur Sipil Negara (ASN) berawal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana ASN ini adalah suatu profesi di lingkup birokrasi yang tujuannya menjadi pelayan masyarakat.¹ ASN terdiri dari PNS dan PPPK dimana yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat secara tetap sebagai Pegawai ASN oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dijelaskan mengenai definisi ASN yaitu sebagai alat kelengkapan negara, terutama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.²

Berkaca pada KUHP, penjelasan tentang ASN sangatlah luas artinya hanya berlaku untuk badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran kantor dan kejahatan lain yang tercantum dalam KUHP, yang disebut definisi ini tidak termasuk dalam UU Kepegawaian. Berdasarkan beberapa pengertian ASN dari berbagai sudut pandang dapat disimpulkan secara singkat bahwa ASN adalah orang yang bekerja pada instansi pemerintah dengan syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹ Miftah Thoha, Konsep Perubahan UU Kepegawaian, Kantor Kota Sukabumi Management Kepegawaian Universitas Gajah Mada, 2016, sukabumikota.kemenag.go.id file dokumen.ppt.

² W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal.478.

Secara khusus dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwasanya Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam berbangsa dan bernegara, pengangkatan seorang ASN juga harus memenuhi beberapa kriteria seperti : memenuhi persyaratan hukum atau yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dan sebuah jabatan dan atau tugas negara lainnya yang didasarkan pada peraturan yang berlaku dan pegawai ASN tersebut digaji menurut ketentuan yang berlaku.

2. Definisi Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa tujuan nasional, ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk melaksanakan tugas yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut, maka diperlukan kerja sama seluruh rakyat Indonesia . Upaya bersama tersebut tentunya kan terwujud dalam peran, fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing komponen Negara dan telah dilaksanakan dengan cermat.

Pertahanan negara merupakan wujud Negara dalam mencapai tujuan nasionalnya. Hakikat pertahanan Negara ialah peran serta setiap warga Negara dan perwujudan hak dan kewajibannya dalam upaya pertahanan Negara sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban setiap warga Negara, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa penyelenggaraan pertahanan Negara dilakukan melalui system pertahanan dan

keamanan nasional bagi seluruh rakyat. Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan yang utama dan didukung oleh rakyat.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar hukum dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia .

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan perangkat pertahanan nasional yang menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan dan keputusan dari negara. Tanggung jawab utama dari TNI adalah menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia . TNI adalah sumber kekuatan utama Negara Republik Indonesia dalam menjaga ancaman yang dapat mengganggu perdamaian Negara baik itu ancaman secara internal contohnya pemberontakan dalam negeri, maupun eksternal seperti pelanggaran batas wilayah dari Negara lain. Prajurit TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Dengan demikian, Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara professional sesuai dengan kepentingan politik Negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi dengan dukungan anggaran belanja Negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

3. Definisi Polisi Republik Indonesia (Polri)

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan Polri. Merupakan lembaga eksekutif perihal menjaga keamanan Negara di wilayah NKRI. Polri mempunyai kedudukan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri di Indonesia yang meliputi teriptanya keamanan serta kedisiplinan warga, tegak serta tertibnya hukum, terselenggarakannya proteksi dan pengayoman serta

pelayanan terhadap masyarakat, dan terbinanya ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu dengan mengedepankan terjunjungnya HAM.

Definisi tentang polisi menurut Momo Kelana yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul tentang hukum kepolisian yaitu sebutan polisi mempunyai 2 makna, satu dalam arti formal yang mencakup organisasi serta peran suatu lembaga kepolisian. Kedua, polisi dalam makna material yang membagikan jawaban-jawaban terhadap perkara tugas serta wewenang dalam mengalami kendala kedisiplinan serta keamanan bersumber pada peraturan perundang-undangan.³

Pengertian kepolisian berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berbunyi yang dimaksud kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut UU menyangkut Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, tercantum rumusan tentang pengertian dari bermacam perihal yang berkaitan dengan polisi, termasuk penafsiran kepolisian. Namun definisi tentang kepolisian tidak dijelaskan secara keseluruhan sebab cuma menyangkut soal fungsi serta lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Karena dalam UU tentang kepolisian diatas dijelaskan bahwa definisi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi, maka perlu penjelasan mengenai keduanya. Yang pertama mengenai fungsi kepolisian dalam pasal 2 UU Tentang Kepolisian berbunyi “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian penjelasan mengenai lembaga kepolisian yaitu sesuatu organ pemerintah yang terorganisasi serta terstruktur yang diresmikan selaku suatu lembaga dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugasnya berlandaskan Undang-undang.

³ Momo Kelana, Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif, PTIK, Jakarta, 1972, hlm. 22.

B. Kedudukan, Hak-hak dan Kewajiban ASN, TNI, Polri

1. Kedudukan, Hak-hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN)

a. Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan di suatu Negara untuk mencapai tujuan nasional atau dengan kata lain, dalam rangka upaya pencapaian tujuan nasional tersebut, maka diperlukan ASN sebagai instrument Negara yang setia pada tugas dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah, serta sadar akan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. ASN harus patuh terhadap Undang-undang sebab tidak ada institusi apapun yang memiliki kekuasaan apapun dalam Negara Indonesia yang tidak terbatas dan dibatasi serta tidak ada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan secara sewenang-wenangan tanpa prosedur demokrasi, tanpa pembatasan dan pengawasan.⁴

Untuk mewujudkan tujuan nasional melalui instrument ASN, maka diperlukan pembinaan yang terbaik berdasarkan system profesi dan system prestasi kerja. Dimana lembaga nasional memang membutuhkan tenaga-tenaga ahli untuk mencapai prestasi kerja yang baik dari anggotanya. Pegawai dengan etika professional yang tinggi biasanya menunjukkan sikap mental dalam melaksanakan aktivitas atau pekerjaan, aktivitas atau pekerjaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku kerja, seperti ketepatan waktu, disiplin, tanggung jawab, ketekunan, rasionalitas, dan kejujuran.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, harus ada sumber daya aparatur yang berkualitas agar fungsi pemerintahan dapat berjalan efektif. Untuk mempercepat pelaksanaan fungsi pemerintahan tersebut, pemerintah dapat langsung menunjuk orang-orang yang bekerja pada lembaga yang mendukung kepentingan nasional. Pengangkatan ialah suatu proses penempatan seseorang pada

⁴Jumadi, Negara Hukum dan Pembangunan Nasiona Berwawasan Hukum, *Jurisprudentie*: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.4 No.1,2017, hal. 76

posisi yang sama atau lebih tinggi dengan jabatan sebelumnya. Pengangkatan pejabat structural merupakan proses penempatan ASN pada jabatan tertentu dengan memperhatikan prinsip akademik yang rasional, antara lain tujuannya untuk memajukan karir ASN pada jabatan dan pangkat structural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diatur mengenai Jenis, Kedudukan, Kewajiban, dan Hak Pegawai Negeri. Mengenai kedudukan pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 3 yang tertulis :

- 1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
- 2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Untuk menjamin netralitas pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.⁶

Kemudian, mengenai kedudukan ASN dalam system politik Indonesia khususnya dalam keterlibatan pemilihan kepala daerah telah diatur dalam beberapa ketentuan undang-undang yang dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya tidak berdampak pada stabilitas pemerintahan di daerah, sehingga ASN diberikan batasan-batasan untuk terlibat dalam kegiatan politik.

Kedudukan ASN telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dimana dalam ketentuannya menegaskan bahwa

⁵ Kranenburg-Vegting, nleiding n het Nederlands Administratief-frecht, dalam Muchsan, Hukum Kepegawaian: Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Suatu Tinjauan dari Segi Yuridis), Bina Aksaran: Jakarta, 1982, hal13.

⁶ Elfina Yulianti Putri, Kedudukan Hak Dan Kewajiban Pegawai Negeri, Universitas Ekasakti (Makalah)

ASN atau PNS adalah unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan pemerintahan serta menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Asas-Asas Kepegawaian (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999) secara jelas menyebutkan status hukum PNS, yang menyatakan bahwa PNS merupakan unsur lengkap dari lembaga negara dan merupakan bagian dari aparatur sipil negara, UUD 1945, negara dan pemerintah, serta penyelenggara tugas pemerintah dan pembangunan

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan ASN menurut peraturan perundang-undangan memegang peran penting dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Oleh karenanya, tidak diperbolehkan untuk ikut terlibat dalam kepentingan-kepentingan politik yang nantinya akan berimbas dalam rangka mencapai tujuan nasional.

b. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian maka ditetapkan bahwa hak Pegawai Negeri Sipil antara lain:

- 1) Setiap PNS berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, gaji yang diterima oleh pegawai negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan (Pasal 7).
- 2) Setiap PNS berhak atas cuti (Pasal 8).
- 3) Setiap PNS yang ditimpa oleh kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya berhak memperoleh perawatan, PNS yang menderita cacat jasmani atau rohani dalam dan karena menjalankan tugasnya dalam kedinasan yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga berhak memperoleh tunjangan, PNS yang tewas keluarganya berhak memperoleh uang duka (Pasal 9).
- 4) Setiap PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun (Pasal 10).

Kemudian, hak PNS yang mana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

- 1) Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- 2) Cuti;
- 3) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- 4) Perlindungan; dan
- 5) Pengembangan kompetensi

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak PNS yaitu mengenai Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas terdapat di Pasal 79, Pasal 80 UU ASN. Untuk Hak PNS mengenai Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari tua diatur di dalam Pasal 91, Perlindungan diatur di dalam Pasal 92, dan Pengembangan Kompetensi diatur di dalam Pasal 69 UU ASN.

Kewajiban PNS adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewajiban tidak boleh di sia-siakan Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ ضَاعَتْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى
يُرَاهُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya :

Rasulullah SAW bersabda : Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi (HR Al-Bukhari dari Abi Hurairah). Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab, “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran tu. (BUKHARI-6015)⁷

Betapa pentingnya menjalankan kewajiban dan betapa tercelanya mengkhianati kewajiban, sebab kehancuran terjadi berawal dari menyianyakan kewajiban dan amanah yang telah diberikan kepada manusia.

Menurut Sastra Djatmika, kewajiban pegawai negeri dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

⁷ <https://www.erasuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran.htm#.YHpOrB8zbIU>.

- 1) Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan.
- 2) Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan.
- 3) Kewajiban-kewajiban lain.⁸

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditetapkan bahwa kewajiban Pegawai Negeri Sipil antara lain:

- 1) Wajib setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4).
- 2) Wajib menaati segala peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab (Pasal 5).
- 3) Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang (Pasal 6).⁹

Setiap pegawai pemerintah memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus dilakukan untuk penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di pusat seluruh wilayah Negara Indonesia dan di tempat-tempat besar maupun kecil, setiap pegawai negeri mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas pemerintahan yang semaksimal mungkin. Oleh karena itu, setiap ASN berkewajiban untuk mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu atau kelompok.

Mengutamakan kepentingan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat tentunya akan mewujudkan harapan masyarakat akan kehidupan yang lebih baik.

Setiap pegawai pemerintah dalam hal ini yang disebut dengan ASN memiliki kewajiban dan tanggungjawab sebagai berikut:

⁸ Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia , 1995, Djambatan, Jakarta, hal.103.

⁹ Adrie, Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, hal.7

- 1) Mengutamakan kepentingan Umum yang harus dilayani guna terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari dalam menyelenggarakan kegiatannya. Mampu mengutamakan kepentingan masyarakat lebih dari kepentingan golongan maupun pribadi, Oleh sebab itumaka setiap ASN memiliki kewajiban untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompoknya.
- 2) Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindar dan mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis Artinya bahwa setiap pegawai ASN harus memiliki pemahaman akan dirinya yang tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan mampu menjaga netralitas Pegawai ASN dari pengaruh dan keterlibatannya dalam kegiatan politik praktis. Setiap ASN tidak dibenarkan untuk terlibat dalam politik praktis yang memihak golongan tertentu. Oleh sebab itu maka setiap ASN adalah bekerja untuk kepentingan semua orang, semua masyarakat, tidak memihak ini akan menjadikan setiap ASN akan mampu berbuat dan bekerja untuk semua orang dan semua masyarakat dan tidak memilih-milih mana masyarakat yang akan dilayani. Berarti semua masyarakat akan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama oleh ASN dalam melaksanakan pekerjaannya.
- 3) Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; artinya bahwa setiap pegawai ASN memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara. Tidak memilih-milih orang untuk melayani masyarakat. Sehingga semua akan dilayani bersama dan adil dalam bekerja.
- 4) Melakukan pelayanan yang dibutuhkan oleh setiap orang yang datang untuk mengajukan keperluan yang harus diselesaikan dalam memenuhi kebutuhannya untuk kehidupannya. Artinya Bahwa sebagai pegawai ASN harus memiliki sikap, perilaku yang terhormat serta mampu melaksanakan pemerintahan yang bertanggungjawab kepada masyarakat. Setiap ASN harus menjaga kehormatannya dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan jujur dan berintegritas, sehingga membawa diri dengan baik dan

berwibawa. Setiap ASN harus memiliki sikap jujur dan berwibawa. Karena jujur akan membawa kepada tanggungjawab yang benar. Kejujuran dan kedisiplinan membawa ASN akan mampu bekerja dengan baik, sehingga masyarakat akan percaya akan kredibilitasnya. Kejujuran akan menjadikan ASN berada pada kepercayaan masyarakat yang sangat dibanggakan. Tidak ada perlakuan yang negative terhadap ASN, sehingga masyarakat yakin akan tercapainya harapan yang akan dicapainya. Masyarakat menghendaki ASN tidak berbuat korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga mampu bekerja dengan baik dan benar.¹⁰

Oleh karena tuntutan dari tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan (yaitu memberikan pelayanan public), perangkat ASN harus memiliki kemampuan, yakni menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); berusaha untuk mengikuti perkembangan lingkungan yang strategis yang cepat berubah (lingkungan internal dan eksternal); perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan munculnya era globalisasi yang tidak bisa disangkal dan tidak bisa dihindari; melaksanakan otonomi daerah.

Dengan memahami tanggung jawab, hak dan kewajiban ASN tersebut, kemudian dapat menciptakan kondisi pelayanan ASN yang lebih baik terhadap masyarakat.

2. Kedudukan, Hak-hak dan Kewajiban Tentara Nasional Indonesia

(TNI)

a. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Zaman Reformasi 1998 terlihat jelas dalam hal mengubah tatanan hukum di Indonesia, TNI yang merupakan sebuah kekuatan yang dominan dalam pemerintahan di masa yang lalu sudah mengubah diri menjadi alat pertahanan profesional dibidangnya sesuai dengan kehendak yang ditentukan dalam tuntutan zaman reformasi. TNI pada paradigma yang telah berubah dalam menempatkan

¹⁰ Muzayanah, Pemahaman Terhadap Tanggungjawab, Hak dan Kewajiban Pegawai Terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol.6 No.1, 2020, hal. 235

penegakan hukum dan demokrasi di mana keduanya merupakan sesuatu yang harus menjadi patokan utama untuk diperjuangkan dalam pelaksanaan pemerintahan Negara dalam mencapai tujuan di negara tersebut.

TNI yang merupakan komponen dalam pertahanan negara yang tugas utamanya adalah demi kepentingan Negara diatas kepentingan segala-galanya. Penegakan hukum serta penegakan demokrasi demokrasi ini harus menjadi sebuah sasaran yang harus diemban untuk diperjuangkan oleh TNI yang merupakan alat pertahanan negara dalam menciptakan keamanan bagi Negara terhadap ancaman dari luar Negara maupun dari dalam. Oleh karena itu dengan sikap patuh terhadap Undang-Undang, TNI dengan menyadari kedudukannya maka dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan perintah dari Presiden dan persetujuan DPR.

Kedudukan Tentara Nasional Indonesia terdapat dalam regulasi yang bergan dengan dengan susunanya yaitu dalam TAP MPR Indonesia No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 3 berbunyi :

- 1) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dalam Undang-Undang.
- 2) Tentara Nasional Indonesia berada dibawah Presiden.
- 3) Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR.
- 4) a). Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
b). Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi maka prajurit TNI tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-Undang.¹¹

¹¹ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia pasal 3

Terkait dengan kedudukan TNI yang berada dibawah Presiden yang berarti setiap melaksanakan fungsinya, TNI dinilai dapat dipengaruhi politik hukum namun di samping itu perlu diingat untuk tidak melupakan tugas utama dari kedudukan Tentara Nasional Indonesia yang merupakan komponen yang paling bertanggungjawab dalam sistem pertahanan negara yang tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2001 tentang Pertahanan Negara dalam menjalankan tugas-tugas pertahan di Indonesia . Sama halnya dengan ntitusi-institusi lain, TNI memiliki tujuan memberikan yang terbaik untuk negara baik dalam mempertahankan dan menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Maupun dalam menjaga Negara dari ancama-ancaman terhadap keutuhan bangsa.

Dalam memperjelas mengenai kedudukan TNI maka dituliskan secara keseluruhan sampai pada kedudukan dari jenis-jenis TNI itu sediri dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu pada Bab pasal 3 dan 4 :

Pasal 3 :

- 1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan dibawah Presiden.
- 2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan adminitrasi, TNI dibawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Pasal 4 :

- 1) TNI terdiri atas Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- 2) Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

Dengan disahkannya Undang-Undang tentang TNI tersebut diatas dijelaskan bahwasanya TNI memiliki kedudukan yang secara umum yaitu pertama tentang masalah mengerahkan dan menggunakan kekuatan militer, TNI memiliki kedudukan dibawah Presiden, Kemudian yang kedua tentang membuat kebijakan serta strategi dalam hal pertahanan Negara dan dukungan adminitrasi TNI dibawah Departemen Keamanan. Oleh karena tu, dalam menjalankan perannya, Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari angkatan darat, laut, dan udara harus

sesuai dengan keputusan pemerintah. Dengan kata lain, TNI dalam menjalankan kedudukan dan fungsinya harus tunduk sesuai dengan yang telah diputuskan pemerintah. Artinya TNI tidak bisa menjalankan tugasnya semata-mata hanya sesuai dengan kebijakan panglima TNI. Namun, harus didasarkan pada kebijakan politik nasional yang dirumuskan bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

b. Hak dan Kewajiban Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia alat pertahanan Negara yang dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 menyebutkan bahwa TNI berfungsi sebagai penangkal semua yang termasuk ancaman militer atau yang bersenjata baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang mengarah kepada kedaulatan, keutuhan serta keselamatan bangsa. TNI bertanggungjawab untuk memulihkan gangguan keamanan Negara yang terjadi karena kekacauan keamanan. Di jelaskan pula bahwasanya dalam memelihara dan meningkatkan keamanan Negara, TNI harus melaksanakan tugas pokok yang terbagi menjadi dua yaitu Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Dalam Undang-Undang TNI tersebut dijelaskan pula penjabaran tentang peran, fungsi dan tugas dari Tentara Nasional Indonesia pada pasal lima, enam, dan tujuh. Dimana dari ketiga pasal tu, dijelaskan yang pertama, TNI berperan sebagai alat Negara pada bidang pertahanan yang ketika menjalankan tugasnya harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara. Yang kedua mengenai fungsi TNI yang merupakan penangkal semua bentuk ancaman militer baik dari dalam maupun luar negeri, penindak semua bentuk ancaman dan memulihkan kondisi Negara yang terganggu akibat perang atau akibat kondisi Negara yang terganggu akibat perang atau akibat kekacauan keamanan. Dan yang ketiga menjelaskan tentang tugas TNI yaitu untuk menegakkan kedaulatan dan mempertahankan keutuhan NKRI berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah ndonesi dari gangguan yang mengarah pada keutuhan bangsa, Dimana pelaksanaan tugas

pokok dari TNI terbagi menjadi Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMPS).

Seperti yang telah ditentukan bahwasanya TNI terdiri atas tiga bagian yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang memiliki tugas masing-masing diatur pula dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Pasal 8, 9, dan 10 :

Pasal 8 :

Angkatan Darat bertugas :

- 1) Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan
- 2) Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan Negara lain
- 3) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat
- 4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Pasal 9

Angkatan Laut bertugas :

- 1) Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan
- 2) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi
- 3) Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah
- 4) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut
- 5) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Pasal 10

Angkatan Udara bertugas :

- a. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

Berbicara mengenai hak dan kewajiban Tentara Nasional Indonesia , hak TNI yaitu misalnya dalam hal memberikan informasi, TNI memiliki hak untuk tidak memberikan informasi publik tentang yang berkaitan dengan TNI yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai yang telah ditetapkan TNI. Dan secara umum TNI berkewajiban untuk menjalankan setiap peran, fungsi, dan seluruh tugas pokok dari TNI baik yang dilakukan dengan cara Operasi Militer Untuk Perang (OMUP) maupun dengan cara Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

3. Kedudukan, Hak-hak dan Kewajiban Polisi Republik Indonesia

a. Kedudukan Polisi Republik Indonesia

Dalam Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia , organisasi kepolisian diatur dari pusat hingga daerah yang disusun secara berjenjang, yakni pada pasal 3 ayat (1), (2), dan (3). Tingkat pusat disebut Mabes Polri, tingkat daerah disebut Kepolisian Daerah (Polda) memiliki satu kesatuan wilayah, yakni Polwil/Polwiltabes, Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta yang masing-masing tingkatan atau tingkatannya memiliki unsur.¹²

Berbicara mengenai kedudukan POLRI, meskipun telah dipisahkan dengan TNI tetapi kedua alat Negara ini masih memiliki kedudukan yang sama-sama berada di bawah presiden. Meskipun penetapan kedudukan POLRI berada di bawah presiden, namun Polri harus di berikan kebebasan dan ruang untuk melakukan pembenahan perubahan secara otonom dan tanpa tekanan politis agar POLRI dapat menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh zaman reformasi ini, misalnya reformasi dari biriorasi dari Polri itu sendiri seperti reformasi instrumental, structural, dan kultural. Untuk memperjelas mengenai kedudukan POLRI ada beberapa aturan yang mengaturnya yaitu :

¹² Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia* , Lex Crimen Vol.I, No.4, 2017, hal. 45

Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000

Pasal 7 :

Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Kepolisian Nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum¹³.

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000

Pasal 2 :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di bawah Presiden.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada presiden.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

Pasal 8 :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002

Pasal 1 : Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri merupakan Kepolisian Nasional yang berada di bawah Presiden¹⁴

Meskipun beberapa aturan telah ditetapkan tentang kedudukan POLRI yang berada di bawah Presiden namun perdebatan memposisikan lembaga kepolisian selalu muncul bahkan pernah terjadi pertentangan serius antar lembaga yang berupaya agar kepolisian berkedudukan di bawah lembaganya yaitu

¹³ Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000

¹⁴ Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 Pasal 1

Kementrian Dalam Negeri, Jaksa Agung dan Kementrian Kehakiman. Namun berkaca pada teori ketatanegaraan menyebutkan bahwasanya negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil, Negara dipimpin oleh Presiden dalam jabatannya selaku kepala negara dan Kepala Pemerintahan. Disisi lain fungsi kepolisian yang mengemban salah satu “fungsi pemerintahan” mengandung makna, bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kepolisian terutama tugas dan wewenang di bidang keamanan ketertiban¹⁵

POLRI adalah institusi yang dianggap sangat penting di Negara Indonesia ni, maka dengan berkedudukan berada di bawah Presiden maka POLRI harus menunjukkan bahwa Presiden memiliki kekuatan dan kekuasaan serta membuktikan bahwa presiden memiliki kewibawaan yang sangat tinggi sebagai Pemerintah Negara serta dalam memimpin penegakan hukum termasuk ketika memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Di zaman modern ni, kita dapat melihat bahwasanya ada berapa banyak bentuk kejahatan yang dapat mengancam serta membahayakan Presiden sebagai Pemimpin Negara dan kepala pemerintahan maka POLRI harus siap sedia untuk dikerahkan dengan tujuan dapat mencegah dan memberantas segala bentuk ancaman tu.

b. Hak dan Kewajiban Polisi Republik Indonesia

POLRI adalah pemeran utama dalam mengayomi masyarakat sekaligus alat Negara yang bertugas untuk menegakkan hukum. Dalam kepolisian harus memegang erat nilai-nilai pancasila untuk dijadikan acuan moral mulai dari nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang maha Esa hingga nilai-nilai pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia . Polisi dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian cantumkan bahwa tugas utama dari Polri itu sendiri adalah sebagai penegak hukum, pelindung , pengayom dan

¹⁵ Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia* , Lex Crimen Vol.I No.4, 2012, hal. 48

pembimbing masyarakat dimana diutamakan agar masyarakat taat dan patuh kepada hukum yang berlaku. Undang-Undang N0. 2 Tahun 2002 merumuskan tugas pokok POLRI tersebut tercantum dalam pasal 13 yaitu :

Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Menegakkan hukum,
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Perlu ditekankan bahwasanya peran POLRI yang dianggap paling penting yaitu dalam persoalan menegakkan hukum, sebab peran ini menjadi tolak ukur maju dan berkembangnya setiap Negara khususnya dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia dapat dikategorikan sebagai Negara maju jika dalam menegakkan hukum dapat menjunjung tinggi HAM. Namun masalah yang kerap terjadi sehingga masalah HAM selalu disepelekan yaitu perbedaan konsep dari HAM itu sendiri di setiap Negara.

Terlepas dari tugas utama yang telah menjadi kewajiban dari POLRI untuk melaksanakannya, anggota Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki hak-hak seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 :

Hak-hak lainnya anggota POLRI meliputi :

- 1) Pelayanan kesehatan,
- 2) Bantuan hukum dan perlindungan keamanan,
- 3) Cuti,
- 4) Kapor Polri,
- 5) Tanda kehormatan,
- 6) Perumahan dinas/asrama/mess,
- 7) Transforrtasi atau angkutan dinas,
- 8) Mpp,
- 9) Pensiun
- 10) Pemakaman dinas dan uang duka, dan

11) Pembinaan rohani, mental, dan tradisi.¹⁶

C. Kode Etik ASN, TNI dan Polri Serta Sanksi Atas Pelanggarannya

1. Kode Etik Aparatur Sipil Negara

Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.¹⁷

Dalam rangka menjaga profesionalisme, kompetensi, dan integritas sistem kepegawaian negara, yang selanjutnya diangkat menjadi Pegawai Negeri melalui perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu. Para pegawai negeri sipil tersebut secara permanen mengangkatnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk mengatur dan mengembangkan kewajiban sendiri, dan bertanggung jawab atas kinerja sendiri. Oleh karena itu, kode etik harus dirumuskan dalam bentuk “kode etik” dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban, dan untuk menghindari semua larangan yang dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri dan pegawai pemerintah sebagai ASN dan sebagai profesi yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dibutuhkan oleh ASN dalam menjalankan tugasnya, yaitu menjaga integritas dan pengetahuan profesionalnya dalam menjalankan tugas publik, tugas pemerintah dan tugas pembangunan. Kode etik telah menjadi landasan bagi institusi sipil nasional.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5

¹⁷ Penjelasan umum atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam kode etik, memuat beberapa prasyarat. Prasyarat tersebut perlu dijadikan pedoman dalam berperilaku dan bersikap dalam menjalankan tugas pejabat publik dalam konteks etika. Pelayanan harus diberikan kepada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, yang dapat meningkatkan daya saing penyediaan barang dan jasa.

Membangun sistem *merit* dalam birokrasi publik berarti menjadikan kompetensi dan kinerja sebagai ukuran utama penilaian aparatur negara. Ukuran ini harus dijadikan sebagai dasar dalam proses seleksi dan rekrutmen, remunerasi, hingga mutasi maupun promosi jabatan. Bukan sebaliknya berdasarkan pada hubungan-hubungan kekeluargaan, pertemanan, dan unsur politik. Kepegawaian negara hanya akan berfungsi secara profesional dan independen jika kompetensi dan kinerja menjadi dasar dalam semua pengukuran. ini berarti pemerintah harus melakukan perombakan secara fundamental terhadap sistem kepegawaian negara.¹⁸

Dalam etika profesi, ASN harus melaksanakan tugas pengabdianya secara profesional dengan menjaga prinsip-prinsip pelayanan, yakni transparansi, tanggung jawab, syarat, partisipasi, persamaan hak dalam arti non diskriminasi. Etika profesi ASN dalam menjalankan tugas pemerintah ialah menjunjung tinggi integritas dan pengetahuan profesional dalam menjalankan kegiatan pemerintah (termasuk menciptakan efisiensi dan efektivitas), sehingga tugas-tugas pemerintah dapat dengan tepat mencapai tujuan sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. integritas diwujudkan dalam kejujuran, keadilan, tanggung jawab, komitmen terhadap pemerintahan, tidak ada korupsi, kolusi dan nepotisme.

Oleh karena telah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka secara resmi ASN dianggap dan diakui sebagai sebuah profesi. Sehingga ASN diwajibkan menginkorporasikan prinsip-prinsip keprofesian dalam dirinya sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Eko Prasjo, Reformasi Kedua (Melanjutkan Estafet Reformasi), (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 90.

Dalam pelanggaran kode etik yang diatur dalam kode etik instansi negara terkait PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (tergolong ASN) dapat dikenakan sanksi etik, baik secara tertulis maupun yang dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian. Dalam memberikan sanksi etik kepada ASN yang melanggar kode etik, perlu dijabarkan jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi. Selain dikenakan sanksi moral juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang dan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Oleh karena itu, perlu dibentuk komite etik dalam menjaga kode etik ASN. Dimana komite etik memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

- 1) Setelah memeriksa ASN yang melanggar kode etik, diambil keputusan
- 2) Keputusan diambil setelah ASN yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk mempertahankan diri
- 3) Keputusan yang diambil oleh Majelis Kode Etik diambil melalui mufakat
- 4) Jika tidak tercapai konsensus, keputusan diambil dari suara terbanyak
- 5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Namun, dalam menjalankan tugas-tugas tersebut Komite Kode Etik wajib mengkomunikasikan keputusan hasil rapat umum kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan untuk menjatuhkan sanksi moral dan sanksi lainnya kepada ASN yang bersangkutan.

ASN seringkali melanggar kode etik secara sengaja dan tidak sengaja ketika menjalankan tugas resmi pada pelayanan publik, pemerintahan dan tugas pembangunan. Dugaan pelanggaran kode etik biasanya bersumber dari pengaduan tertulis atau hasil penyidikan yang dilakukan oleh atasan. Pengaduan tertulis yang diajukan oleh masyarakat atas pelanggaran kode etik atau ditemukan oleh pimpinan perlu diklarifikasi oleh Majelis Kode Etik, dan wajib dilakukan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dapat menjelaskan kepalsuannya, kemudian memberikan rekomendasi sanksi etika. Para ASN dapat

menggunakan hasil klarifikasi dan hasil penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik sebagai dasar pengenaan sanksi moral. ASN yang diduga melanggar kode etik wajib merumuskannya secara bertahap dengan pejabat yang lebih tinggi.

ASN berdasarkan laporan publik dan hasil nvestigasi pimpinan ntansi atau hasil pemantauan laporan nternal pemerintah yang diduga atau bahkan dipastikan bahwa ASN terbukti didasarkan pada hasil penelaahan majelis kode etik melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi. Sanksi atas pelanggaran kode etik meliputi:

- 1) Permintaan maaf tersebut dinyatakan dalam pernyataan/surat permohonan maaf
- 2) Pernyataan penyesalan dicantumkan dalam surat pernyataan penyesalan
- 3) Jika mengulangi perilaku atau melanggar kode etik yang diuraikan dalam pernyataan sikap lagi, maka bersedia dijatuhi disiplin sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Sanksi disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dan diberi materai. Pejabat yang berwenang dapat mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum konferensi resmi (misalnya pada upacara penutupan bendera, papan buletin, media massa, dan/atau forum lain yang diperlukan), atau di forum resmi sanksi. Dapat juga dilaukan di ruangan tertutup, hanya instansi sipil negara yang bersangkutan yang mengetahui bahwa orang tersebut telah dijatuhi sanksi karena melanggar kode etik.

2. Kode Etik Tentara Nasional Indonesia

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri dengan jelas dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Selain itu, menurut UUD 1945, Indonesia ialah negara hukum di mana segala perbuatan manusia, baik yang melakukan perbuatan hukum maupun tidak, harus mematuhi semua peraturan yang berlaku. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pertahanan dan keamanan negara.

Untuk mencapai stabilitas nasional, lembaga keamanan nasional harus berkualitas dan ditempatkan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Badan kementerian yang dimaksud di sini, ialah TNI Angkatan Darat (TNI-AD), TNI Angkatan Laut (TNI-AL), TNI Angkatan Udara (TNI-AU).

Sikap dan perilaku anggota TNI tentunya diatur oleh kode etik profesi untuk mencegah perilaku yang dapat mengakibatkan pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran hukum. “Kode Etik Profesi” tersebut bersifat mengikat bagi anggota TNI. Oleh karena itu, setiap anggota TNI harus memahami, menaati serta mematuhi nilai-nilai etika yang telah ditetapkan dalam kode etik yang diharapkan mampu menjaga setiap perilaku yang baik dan benar. Oleh karena itu, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau perilaku yang dapat dimaklumi karena perilaku tersebut melanggar kode etik atau etika yang ditetapkan.

Kode etik atau yang disebut jati diri TNI terdiri atas Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI, yakni :

a. Sapta Marga

- 1) Kami warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila
- 2) Kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara, yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
- 3) Kami ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
- 4) Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia .

- 5) Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia , memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
- 6) Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia , mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
- 7) Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit.

b. Sumpah Prajurit

- 1) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
- 3) “Taati kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
- 4) “Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia .
- 5) Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

c. 8 Wajib TNI

- 1) Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
- 2) Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
- 4) Menjaga kehormatan diri di muka umum.
- 5) Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
- 6) Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
- 7) Tidak sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
- 8) Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Namun nyatanya yang terjadi selama ini ialah anggota TNI masih melakukan pelanggaran, karena anggota TNI sebenarnya juga merupakan manusia biasa yang tentunya tidak bisa dihindarkan dari kesalahan dan kekhilafan.

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 UU tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, bahwa Dalam menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya, wajib bersikap dan berlaku disiplin.

Disiplin sudah menjadi keharusan bagi anggota TNI sebagai masyarakat umum yang telah dilatih khusus untuk melindungi dan membela negara. Baik Tamtama, Bintara maupun Perwira seluruh prajurit TNI harus dan wajib menaati ketentuan yang berlaku di lingkungan kemiliteran, yakni berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kemiliteran yang selanjutnya disebut KUHPM, peraturan tentang disiplin prajurit TNI yang disahkan dengan SK Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005. Ketentuan peraturan lainnya, yakni peraturan Urusan Dalam Negeri (PUD), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia , dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan disiplin militer, misalnya pada Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan Delapan (8) Wajib TNI.

Saat ni, tatanan kehidupan TNI telah berubah, terkadang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan tindakan yang dilakukan oleh sebagian anggota TNI tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI. Hal ini tentunya mempengaruhi tindakan prajurit lainnya, sehingga tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Pelanggaran disiplin militer ialah setiap perilaku dan/atau perbuatan yang melanggar prinsip hidup prajurit berdasarkan Sumpah Prjurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI atau melanggar peraturan resmi dan merusak kehormatan organisasi dan prajurit TNI. Pelanggaran disiplin dapat merusak dan merugikan nama baik kesatuan, nama baik masyarakat serta negara. Selain tu, hal yang fatal ialah dapat membahayakan nyawa prajurit TNI atau orang lain.

Sebagai anggota TNI, tentunya harus memiliki kepribadian yang kuat untuk menjalankan tugas yang telah diberikan oleh atasan. Dengan demikian, tujuan utama (visi dan misi) dapat tercapai tanpa melanggar aturan atau norma

yang telah ditetapkan di tubuh TNI. Anggota TNI memiliki kepribadian yang kuat, dan mereka akan dapat menerima serta menjalankan tugas-tugas tersebut dengan khlas dan tekad, dengan reputasi yang baik untuk persatuan dan status prajurit yang bermartabat. Prajurit TNI yang bekepribadian kuat akan merasa tertantang ketika mendapat dari atasannya. Mereka berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan memiliki derajat kontrol yang tinggi untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan di lingkungan militer, sehingga peluang prajurit melakukan pelanggaran sangat kecil.

Setelah reformasi, pemerintah merancang UU yang mengatur mengenai hukum disiplin di kalangan militer. Yang diharapkan mampu untuk mengatur perbuatan prajurit TNI agar tetap profesional, memenuhi kebutuhan dalam pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan disiplin prajurit TNI serta penegekan hukum disiplin prajurit TNI.

Sanksi dalam “Hukum Disiplin Prajurit TNI” terdiri atas sanksi disiplin: ringan, sedang dan berat. Sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Sanksi disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat, rawatan kedinasan bagi Prajurit TNI diberhentikan sementara dari jabatan dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Sanksi disiplin berupa pemberhentian sementara dari jabatan, perpanjangan pemberhentian sementara dari jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.”¹⁹

Dalam hal terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota militer, penanganan keamanannya dilakukan oleh provost denpom V/3 atau provost di lingkungan militer lainnya. Kemudian, untuk menyelesaikan pelanggaran disiplin yang murni dilakukan oleh prajurit TNI, penanganannya merupakan kewenangan atasan, dan atasan memiliki kewenangan untuk menghukum dan menyelesaikan masalah disiplin tersebut.

¹⁹ Eka Martiana Wulansari, Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Paska Reformasi, Jurnal Rechts Vinding, hal. 5

3. Kode Etik Polisi Republik Indonesia

Sebagai salah satu sub sistem pemerintahan, Polri telah melakukan upaya-upaya aktif dalam menyikapi pelaksanaan tugas pokok memelihara ketertiba dan jaminan sosial, menegakkan hukum, melindungi, membina dan melayani masyarakat, serta memberikan kontribusi bagi terwujudnya kehidupan masyarakat. Asas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di dalam Polri, dicanangkkn dalam bentuk *trust-building* (membangun kepercayaan).

Di era reformasi, kompleksitas tanggung jawab dan tantangan Polri juga banyak memberikan kemajuan, misalnya dalam bidang penguatan, pembinaan dan operasional. Namun, di sisi lain, secara jujur mengakui bahwa terdapat akses negatif dalam menjalankan tugas pokoknya, yang diwujudkan dalam perilaku menyimpang dari anggota Polri, seperti penyalahgunaan kekuasaan, dan perilaku tercela lainnya yang melanggar moral, sosial dan lain-lain termasuk di dalamnya prinsip agama.

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut melanggar Peraturan Disiplin Anggota Polri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun, saat ini penegakan tindakan disipliner terhadap anggota Polri diyakini masih jauh dari harapan, karena proses penegakan hukum dan hasil penegakannya masih jauh dari harapan. Dimana proses dan hasil penegakkannya belum mampu memberikan dampak positif yang maksimal bagi perilaku anggota Polri. Dapat dilihat dari segi aturan tata tertib, antara lain masih terdapat perbedaan persepsi masyarakat terhadap anggota Polri yang melanggar ketentuan tata tertib.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia . Sebagai pegawai negeri, maka syarat pengangkatan dan pemberhentian anggota Polri tertikat pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku di lingkungan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁰

Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Anjum dari diperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum.²¹ Dalam pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, Terperiksa dapat didampingi oleh anggota Polri yang ditunjuk oleh diperiksa.²²

D. Rangkap Jabatan

1. Defenisi Rangkap Jabatan ASN, TNI dan Polri

Rangkap jabatan berangkat dari kata kerja “rangkap” yang diartikan sebagai “ganda”, yang jika dimaknai secara luas menjadi “merangkap” yang berarti menduduki jabatan lain selain jabatan tetap; terdapat lebih dari satu pekerjaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rangkap jabatan ialah perbuatan atau kehendak seseorang untuk menduduki dua atau lebih jabatan dalam pemerintahan atau organisasi. Selanjutnya, berkaitan dengan yang akan dikaji dalam tulisan ini, rangkap jabatan yang dimaksud adalah rangkap jabatan terkait pejabat publik dalam hal ini ASN, TNI dan Polri.

Dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan bahwa seorang pegawai ASN akan memiliki jabatan dalam kedudukannya, baik dalam jabatan administrasi, jabatan fungsional atau jabatan pimpinan tinggi. Selanjutnya dalam ketentuan yang sama pasal 109 ayat (2) menentukan bahwa jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.

²⁰ Natiya, *Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak)*

²¹ Lihat Peraturan Kapolri No.Pol.7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, pasal 16

²² Lihat Peraturan Kapolri No.Pol.7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, pasal 17

Selanjutnya terkait dengan Polri yang merangkap jabatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 28 ayat (3) yang menentukan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Sedangkan yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian ialah jabatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian atau tidak berdasarkan pada penugasan dari kapolri. Artinya bahwa, seorang anggota kepolisian hanya dapat menduduki satu jabatan yang apabila harus menduduki jabatan lain di luar kepolisian, maka harus mengundurkan diri terlebih dahulu atau telah pensiun dari dinas kepolisian. Begitupun dengan TNI, rangkap jabatan yang dilakukan oleh TNI juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia .

Oleh karena ASN, TNI dan POLRI merupakan orang yang bekerja di sektor publik dan erat kaitannya dengan kebutuhan serta pelayanan masyarakat, maka sangat mudah pula terjerumus dalam benturan kepentingan. Dimana kepentingan publik itu sendiri begitu luas serta universal. Kepentingan umum biasanya bertentangan dengan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Ketika keduanya tidak konsisten, maka diharuskan untuk bertindak di tengah persimpangan, akhirnya memicu konflik kepentingan.

Rangkap jabatan di lingkungan BUMN/D biasanya diposisikan dalam rangkap jabatan Direksi atau Komisaris yang berkaitan erat dengan adanya kesamaan kepemilikan saham dari dua atau lebih perusahaan. Atau dengan kata lain, secara tidak langsung ketentuan tentang rangkap jabatan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan lain, misalnya tentang kepemilikan saham, serta tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan²³

Meskipun tindakan rangkap jabatan itu telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan, baik yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

²³ Frans Satrio Waicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas, Visimedia: Jakarta, 2009.

Tidak Sehat maupun yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, tetap saja masih terjadi.

Pada esensinya, rangkap jabatan dilarang dalam rangka mencegah terjadinya pertukaran informasi dan atau kerjasama kolusif antar pelaku usaha yang saling bersaing yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya secara substansial persaingan di pasar dan memiliki dampak praktek monopolisasi atau merugikan perkembangan perekonomian.²⁴

Dengan demikian, larangan tersebut diberlakukan bagi ASN, TNI dan POLRI mengingat bahwa rangkap jabatan dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, yakni situasi dimana terdapat benturan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta dapat memicu terhalangnya persaingan usaha tidak sehat.

2. Konflik Kepentingan ASN, TNI dan POLRI

Konflik kepentingan merupakan sebuah konsep yang banyak digunakan untuk menelisik resiko etis dari sebuah profesi dan tindakan. Kemunculannya yang cukup pervasif berakar dari kenyataan bahwa naluri manusia merupakan makhluk yang lemah dan rentan.²⁵ Padahal Allah SWT menekankan dalam firman-Nya agar semua manusia harus menjaga segala sesuatu yang telah diamanahkan dan dipercayakan kepadanya artinya harus menjalankan amanah itu dengan semestinya dan harus tetap bersikap adil, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

²⁴ Majalah Gatra, "Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia , Draft Pedoman Pengawasan Persaingan Usaha di Sektor Telekomunikasi, <http://www.gatra.com/artukel.php?id=217607>. Diakses 3 Maret 2021

²⁵ N. Nikolov, Conflict of Interest in European Public Law. Jurnal of Financial Crime Vol.20 No.4 2013, hal.406

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. Al-Anfal 8:27).²⁶

Dalam menjalankan suatu amanah baik itu jabata, kepercayaan dan lain sebagainya manusia di perintahkan untuk menjaganya serta tidak berkhianat agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia karena barang siapa yang menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya maka di berhak mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT, namun sebaliknya barang siapa yang mengkhianati amanat tu, maka a akan mendapatkan azab yang keras dan telah menjadi orang yang mengkhianati Allah SWT dan Rasul-Nya.

Biasanya, konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan ndividu tidak sesuai dengan kepentingan orang atau organisasi lain yang loyal. Selain tu, ketika seseorang harus merespon kepentingan dua ndividu, kelompok atau organisasi yang saling bertentangan, maka konflik kepentingan juga dapat muncul. Jika hanya kepentingan satu pihak saja yang menjadi pertimbangan, maka kepentingan pihak lainnya akan dirugikan.

Argumen bahwa seseorang diharuskan untuk menghindari konflik kepentingan ialah bahwa situasi tersebut mengganggu proses penilaian dan evaluasi yang jelas, dan seseorang perlu dievaluasi dengan cara yang objektif. Pengaruh atau kepentingan tersebut tidak merusak kepentingan seseorang, tetapi menghalangi proses pertimbangan yang adil. Namun tidak semua faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang dapat diklasifikasikan sebagai variabel penyebab benturan kepentingan.

Dengan demikian, dalam konsep konflik kepentingan, kepentingan bersifat kontekstual dan variatif, tergantung pada organisasi tempat ndividu itu bekerja. Dari segi kelembagaan, fokus pada resiko benturan kepentingan yang diarahkan pada dampak dari proses pengambilan keputusan dan hasil-hasilnya. Karena adanya hubungan antara konflik kepentingan dengan peran ndividu dalam organisasi, konflik kepentingan akan teridentifikasi ketika dampak pada

²⁶ <https://dalamislam.com/landasan-agama/al-quran/ayat-ayat-al-quran-tentang-amanah>.

kepentingan nheren seseorang mendistorsi peran yang diharapkan organisasi dari orang tersebut. Namun faktor kelembagaan juga dapat meningkatkan kompleksitas konflik kepentingan.

Jika terdapat kerjasama dan kesepahaman untuk menutupi, melindungi atau bahkan menggunakan benturan kepentingan yang dialami individu dalam organisasi, maka benturan kepentingan tersebut dapat berubah menjadi korupsi organisasi. Hal tersebut hanya dapat diantisipasi dengan memahami bahwa konflik kepentingan bukanlah fenomena yang terisolasi dan singular melainkan saling berkaitan, viral dan multipihak.

Namun, organisasi yang mengedepankan untuk menjaga integritas nya akan mengidentifikasi kepentingan apapun yang dapat menghalangi anggotanya dalam memenuhi tugasnya dan mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya ada kepentingan yang jelas, tetapi juga kepentingan yang dapat mengganggu individu untuk menyimpang dari perilaku organisasi yang diharapkan, dan kepentingan yang oleh pengamat eksternal tampaknya menyebabkan konflik kepentingan, meskipun fakta tersebut dimungkinkan tidak terjadi.

BAB III

KAJIAN TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. Defenisi Badan Usaha Milik Negara

Secara umum, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan badan usaha yang kepemilikannya sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh negara.¹ Dalam hal ini ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia . Ada juga badan usaha milik negara yan berbentuk badan usaha non-profit.

Tujuan didirikannya badan usaha milik negara nirlaba ini ialah untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat. BUMN hadir sebagai perwujudan pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Selain tu, masalah permodalan BUMN sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia . Olehnya itu pemerintah dalam segala aspek harus menjadikan pancasila dengan nilai-nilai yang dikandungnya sebagai dasar dan haluan dalam penyusunan segala kebijakannya². Agar BUMN menjadi badan usaha yang di harapkan oleh seluruh rakyat Indonesia .

Pembahasan mengenai pengertian BUMN juga dijelaskan dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2003 dalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa badan usaha milik negara merupakan sebuah badan usaaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah. Semua negara yang memiliki BUMN dalam wilayahnya ketika diteliti ternyata mempunyai kesamaan, misalnya dalam agent of development mempunyai kesamaan dengan tugas dari apa yang diamanatkan dengan pasal 33 dalam UUD 1945. Negara Indonesia mendirikan BUMN yaitu agar pengembangan perekonomian nasioanal dapat terdorong sebagaimana tertuan

¹ Risky Firmansyah, Tinjauan Yuridis Pengaturan Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Atau Dewan Pengawas di BUMN (skripsi), Universitas Brawijaya, 2018

²Ashabul Kahpi, Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca Tap MPR No.1/MPR/2003, *Jurisprudentie*: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.4 No..2,2017, hal. 67

pada pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang tujuan dari didirikannya BUMN tersebut yaitu :

- 1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya,
- 2) Mengejar keuntungan,
- 3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak,
- 4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi,
- 5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Modalnya sendiri diperoleh melalui; penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara dan segaja dipisahkan. Artikel tersebut juga menyebutkan bahwa kegiatan utama BUMN ialah mengelola sektor produksi yang penting bagi negara untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ialah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisah (menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003). Selain Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan koperasi, BUMN juga merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional. Kontribusi BUMN terhadap perekonomian Indonesia dan berperan dalam produksi berbagai barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat. BUMN beroperasi di berbagai sektor antara lain, pertanian, perkebunan, kehutanan, keuangan, manufaktur, transportasi, pertambangan, ketenagalistrikan, telekomunikasi, perdagangan, dan konstruksi.

Sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, keberadaan BUMN berpedoman pada UUD 1945, selain swasta dan koperasi. Keikutsertaan negara dalam kegiatan tersebut pada dasarnya mencerminkan substansi Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa sektor produksi yang penting bagi negara dan menguasai penghidupan masyarakat dikuasai oleh negara” dan ayat (3) yang menyatakan

bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Perlu diingat bahwa peran BUMN ialah untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi, oleh karena itu kebijakan pemerintah untuk memajukan BUMN telah disesuaikan dengan kebijakan nasional. Sebagai negara yang menganut paham ekonomi terbuka, perekonomian nasional tidak terlepas dari pesatnya perkembangan perekonomian dunia. Akibatnya, sesuai dengan kondisi dan perkembangan ekonomi nasional dan ekonomi dunia, kebijakan pembinaan BUMN selalu perlu disesuaikan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ialah perusahaan terbuka yang memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi dan pendapatan negara, perintisan kegiatan usaha, dan kebijakan pemerintah yang mendukung dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Selain tu, BUMN juga merupakan alat untuk mencari keuntungan. Dalam hal ni, BUMN terdiri dari beberapa bentuk seperti Persero, Perjan dan Perum. Oleh karena tu, BUMN sangat berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian negara, dan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah termasuk lingkungan politik negara tersebut. Sehingga, latar belakang dan perkembangannya tidak terlepas dari regulasi yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah.

B. Fungsi Badan Usaha Milik Negara

Fungsi Badan Usaha Milik Negara ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan. Tentunya hal tersebut sesuai dengan tujuan dari berdirinya badan itu sendiri. Beberapa fungsi BUMN, yaitu:

1. Sebagai badan penyedia produk baik itu barang dan jasa bagi masyarakat, dalam hal ini rakyat Indonesia .
2. Berfungsi sebagai salah satu media bagi pemerintah untuk membuat kebijakan perekonomian.
3. Sebagai alat untuk menciptakan lapangan kerja.

4. Berfungsi sebagai sumber pendapatan dan devisa negara
5. BUMN dapat juga dijadikan sebagai media pengembangan usaha kecil, termasuk UKM serta koperasi.
6. Sebagai salah satu simultan atau stilahnya ialah pendorong munculnya beberapa peluang usaha baru yang berkaitan dengan fungsi menciptakan lapangan kerja.
7. Sebagai pengelola SDA
8. Sebagai pelopor pembangunan. Dari beberapa macam sektor usaha yang sekiranya belum terjamah oleh sektor swasta.

C. Latar Belakang Pembentukan Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara adalah sebuah bagian dari kegiatan dalam perekonomian nasional pada demokrasi ekonomi. BUMN memiliki peran yang sangat penting dari terselenggarakannya perekonomian nasional di Indonesia dalam memenuhi kesejahteraan bagi masyarakat. BUMN membutuhkan keprofesionalan dalam hal pengurusan dan pengawasan agar pelayanan terhadap masyarakat dapat maksimal sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mengelola dan mengorganisasikan kepentingan individu-individu dan kelompok-kelompok yang menjadi anggotanya sehingga interaksi sosial dapat berjalan secara lancar atau yang disebut sebagai kekuasaan masyarakat.³

Latar belakang di bentuknya UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah karena peraturan perundang-undang yang sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga pada tanggal 19 Juni 2003 di Jakarta di sahkanlah Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN ini oleh presiden saat itu yaitu presiden Megawati Soekarnoputri dan salah satu cara supaya Undang-undang ini di ketahui oleh semua orang maka Undang-Undang No. 19 tahun 2003 ini ditempatkan di lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, dan

³Andi Safriani, Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan, *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.4 No.2, 2017, hal. 40

penjelasannya ditempatkan pada tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4297. Pokok-pokok bahasan yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu : Persero, Perum, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran BUMN, Kewajiban Pelayanan Umum, Satuan pengawasan intern, Komite Audit, dan Komite Lain, Pemeriksaan Eksternal, dan Restrukturisasi dan privatisasi.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terdiri dari 11 Bab dan 95 Pasal, Penjelasannya terdiri dari 23 halaman dan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini yaitu semua Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (perjan) untuk diubah bentuknya menjadi Perum dan Persero, dalam waktu dua tahun.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yaitu:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar tahun 1945,
2. Ketetapan MPR Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Garis-Garis besar Haluan Negara Tahun 1999-2004,
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No.13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286)⁴

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN berperan dalam memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peranan BUMN menjadi semakin penting karena

⁴ Risky Firmansyah, Tinjauan Yuridis Pengaturan Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Atau Dewan Pengawas di BUMN (skripsi), Universitas Brawijaya, 2018

menjadi pionir dan/atau perintis di bidang usaha yang belum menarik perusahaan swasta. Selain itu, BUMN juga memiliki peran strategis sebagai penyelenggara pelayanan publik, dapat mengimbangi kekuatan swasta yang besar, dan berkontribusi dalam pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan sumber penting pendapatan negara dalam bentuk berbagai pajak, deviden dan hasil privatisasi

Peran BUMN tercermin dari kegiatan komersial di hampir semua sektor ekonomi, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos, dan telekomunikasi, transportasi, ketenagalistrikan, industri dan perdagangan, serta konstruksi.⁵

Meskipun BUMN telah mencapai tujuan awalnya sebagai agen untuk pengembangan dan promosi pendirian perusahaan, namun tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. Hal ini dapat dilihat dari laba yang lebih rendah dibandingkan dengan modal yang ditanamkan sehingga kinerja perusahaan kurang baik. Karena berbagai kendala, BUMN tidak dapat sepenuhnya menyediakan barang dan/atau jasa yang berkualitas tinggi kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau, juga tidak dapat berpartisipasi dalam persaingan komersial global. Selain itu, karena keterbatasan sumber daya, fungsi BUMN sebagai pelopor dan penyeimbang kekuatan swasta yang besar belum sepenuhnya terlaksana.

Guna mengoptimalkan perannya dan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya dan profesionalisme perusahaan melalui peningkatan pengelolaan dan pengawasan. Pengelolaan dan pengawasan BUMN harus didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

M A K A S S A R

⁵ Risky Firmansyah, Tinjauan Yuridis Pengaturan Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Atau Dewan Pengawas di BUMN (skripsi), Universitas Brawijaya, 2018

Efisiensi dan produktivitas BUMN harus ditingkatkan melalui langkah restrukturisasi dan privatisasi. Reorganisasi departemen untuk menciptakan suasana bisnis yang mendukung untuk mencapai efisiensi dan layanan terbaik. Sedangkan reorganisasi perusahaan meliputi reorganisasi badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, kepengurusan dan bentuk keuangan.

Privatisasi tidak hanya diartikan sebagai penjualan perusahaan, tetapi juga sebagai alat dan sarana untuk menata kembali BUMN untuk mencapai berbagai tujuan sekaligus, termasuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbaiki struktur keuangan dan manajemen, menciptakan lingkungan yang sehat dan kompetitif, struktur industri dan penguatan BUMN. Mampu bersaing dan memiliki posisi global, menyebarkan kepemilikan oleh masyarakat dan mengembangkan pasar modal dalam negeri. Dengan melaksanakan privatisasi BUMN, tidak berarti penguasaan atau kedaulatan negara atas BUMN yang bersangkutan melemah atau hilang, karena sebagaimana tersebut di atas, negara tetap menjalankan fungsi pengawasannya melalui peraturan departemen, dimana BUMN diprivatisasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya.

Undang-Undang BUMN itu sendiri bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas untuk meningkatkan kinerja dan nilai BUMN serta mencegah BUMN melakukan tindakan di luar prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Undang-Undang tersebut juga bertujuan untuk mengatur dan memperkuat peran kelembagaan dan status perwakilan pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMN, serta mempererat dan memperjelas hubungan antara BUMN sebagai operator usaha dan lembaga pemerintah sebagai regulator.

D. Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara terbagi ke dalam dua jenis sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu:

1. Perusahaan Perseroan (Persero)

Perseroan ialah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham. Indonesia memiliki seluruh atau sekurang-kurangnya 51% saham dengan tujuan utama untuk mengejar keuntungan. Sementara itu, perseroan terbuka ialah perseroan terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi standar tertentu, atau perusahaan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya, pengurus perseroan memiliki dua macam kewajiban, yaitu kewajiban yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang (*statutory duties*) dan *fiduciary duties*⁶. Adapun ciri-ciri dari perseroan, yaitu meliputi:

- a. Diusulkan oleh menteri kepada presiden
- b. Berstatus Perseroan Terbatas (PT) yang telah diatur berdasarkan perundang-undangan
- c. Seluruh atau sebagian modalnya ialah milik negara dari kekayaan yang dipisahkan.
- d. Organ persero meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris
- e. Apabila pemerintah memiliki seluruh sahamnya, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka PT berlaku sebagai pemegang saham.
- f. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh RUPS
- g. Dipimpin oleh direksi
- h. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka RUPS dapat melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris
- i. Laporan tahunan disahkan oleh RUPS
- j. Tujuan utamanya yakni untuk memperoleh keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

⁶ Erlina. Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perseroan Terbatas. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.4. No.1 2017, hal. 28

2. Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum (perum) ialah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak dibagi atas saham. Perum bertujuan untuk mewujudkan kepentingan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi, sekaligus mengejar keuntungan sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan. Adapun ciri-ciri Perum, yaitu meliputi:

- a. Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden
- b. Berstatus badan hukum yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah.
- c. Organ perum yakni Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas
- d. Dipimpin oleh Direksi
- e. Tiap tahunnya, buku perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba untuk cadangan.
- f. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Perum dipimpin oleh Menteri sehingga berkewajiban untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas
- g. Pekerjanya ialah pegawai perusahaan swasta.

Maksud dan tujuan dibentuk Perum ialah untuk menjalankan usaha sebagai utilitas umum berupa penyediaan produk dan/atau jasa berkualitas tinggi kepada masyarakat dengan harga yang wajar berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh Perum, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang melebihi nilai kekayaan negara yang dipisahkan ke dalam Perum.

BAB IV

PROBLEMATIKA RANGKAP JABATAN ASN, TNI, DAN POLRI MENJADI KOMISARIS DI BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. Pertimbangan Diangkatnya ASN, TNI dan Polri Menjadi Komisaris BUMN di Indonesia

BUMN ialah suatu perusahaan yang dimana seluruh atau sebagian modalnya merupakan milik negara. Sedangkan masyarakat ialah pemilik utama BUMN, dimana BUMN tidak serta-merta hanya mencari keuntungan tetapi juga memiliki kewajiban untuk melayani kepentingan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

Sebagai pemilik sekaligus konsumen BUMN, masyarakat tentunya menginginkan agar BUMN bisa menjadi pelayan publik secara optimal. Tidak hanya memberikan pelayanan kepada pihak-pihak tertentu saja melainkan mampu untuk menjangkau seluruh lapisan dengan biaya yang terjangkau serta sesuai dengan amanat undang-undang.

Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri negara (*founding fathers*) dan menjadi salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia harus mampu dipahami secara baik dan tepat oleh segenap bangsa Indonesia, selanjutnya harus diwujudkan oleh pemerintah sebagai pengelola negara.¹ Oleh karena tu, standar transparansi dan akuntabilitas yang tinggi diperlukan agar masyarakat yakin bahwa BUMN yang dikelola oleh pemerintah digunakan sesuai dengan kepentingan publik.

Transparansi atau keterbukaan berarti sebuah keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh sebuah lembaga, transparansi juga bisa berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan institusi harus tersedia secara mudah dan bebas serta bias diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang

¹ Bahrul Imi Yakup, Dekonstruksi dan Reformulasi Hukum BUMN di Indonesia ; Upaya Menciptakan BUMN Kesejahteraan Rakyat, Genta Publishing: Yogyakarta, hal.106

dilakukan oleh suatu institusi tersebut.² Transparansi juga bisa berarti bahwa transparansi haruslah dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi, informasi tersebut mudah untuk diakses, dan informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan dan evaluasi.³

Transparansi merupakan sesuatu yang nyata, jelas, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya, adanya konsep transparansi dibutuhkan dan diwajibkan untuk dilakukan di dalam institusi atau lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang telah atau akan diambil oleh setiap institusi-institusi tertentu.

Kementerian BUMN memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan yang dimana dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap BUMN.⁴ Namun, dari fakta yang terjadi di lapangan, dalam melaksanakan tugasnya, terjadi benturan kepentingan antara kepentingan masyarakat dengan komisaris dan pengawas BUMN yang dipekerjakan atas nama masyarakat sehingga menimbulkan rangkap jabatan.

Sejak dua belas tahun lalu, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Aparatur Milik Negara berkomitmen melarang para pegawai mereka untuk rangkap jabatan. Dimana Para pegawai dilarang untuk menerima peran tambahan berbayar di luar jabatan publik mereka, misalnya sebagai dewan (komisaris maupun pengawas) BUMN. Hal tersebut dilarang karena dikhawatirkan akan merugikan masyarakat. Namun, dari banyaknya su bahkan fakta yang terjadi di lapangan, mengasumsikan bahwa

² Hamid Abidin dan Mimin Rukmini, Kritik dan Otokritik LSM, Piramedia Jakarta, 2004, hal. 63-65.

³ Andi Safriani, Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Jurnal Jurisprudentie Vol.7 No.1, 2020, hal. 63

⁴ Bahrul Imi Yakup, Dekonstruksi dan Reformulasi Hukum BUMN di Indonesia ; Upaya Menciptakan BUMN Kesejahteraan Rakyat, Genta Publishing: Yogyakarta, hal.25

komitmen yang telah ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) telah dilupakan.

Data dari Ombudsman menunjukkan bahwa kejadian tersebut bukanlah hal baru. Pada tahun 2017 pun Ombudsman menemukan ada 222 orang komisaris BUMN yang merangkap jabatan.⁵ Kemudian data yang dikeluarkan Ombudsman pertahun 2020 kemarin, menyebutkan bahwa ada lebih dari 564 orang pejabat negara yang merangkap jabatan di beberapa BUMN dan anak perusahaannya.⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa SKB yang telah ditetapkan pada dua belas tahun silam tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Fenomena rangkap jabatan pejabat pemerintah yang menduduki posisi komisaris BUMN tentu saja akan menimbulkan pro dan kontra. Hal tersebut dikarenakan ada kebijakan yang mengizinkan pejabat publik merangkap jabatan, namun di sisi lain ada juga kebijakan yang secara tegas melarang rangkap jabatan di pemerintahan.

Kebijakan yang mendukung rangkap jabatan bersumber dari Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN menyatakan bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bisa berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah.

Adanya regulasi yang saling bertentangan mengenai posisi serentak ASN, TNI dan Polri telah menimbulkan kerancuan dan kerancuan. Tentu saja, ini juga salah satu su kontradiktif dalam banyak kebijakan di Indonesia . Oleh karena tu, dalil penolakan jabatan tidak dapat didasarkan pada alasan hukum formal, karena sebenarnya ada peraturan yang mengizinkan hal tersebut. Oleh karena tu, perumusan regulasi untuk memperjelas apakah penyelenggara pelayanan publik dapat secara seragam menjabat sebagai komisaris BUMN perlu segera dilaksanakan.

⁵ Sumber : Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tahun 2017

⁶ Sumber : Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tahun 2020

Penyelenggara pelayanan publik yang juga komisaris badan usaha milik negara akan menerima pendapatan ganda dari sumber yang sama, yaitu dana negara. Selain pemborosan anggaran, hal ini juga tidak adil, karena kedua pekerjaan tersebut tidak sepenuhnya selesai, karena harus mengalokasikan waktu dan perhatian, sehingga mendapat penghasilan penuh.

Dengan demikian, remunerasi pengurus BUMN harus ditetapkan secara proporsional dengan laba bersih masing-masing BUMN. Artinya, jika laba BUMN meningkat, maka remunerasi direksi BUMN akan meningkat. Pengawasan pasti akan menarik minat pejabat, sehingga BUMN bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, menurut peraturan, dapat diasumsikan bahwa rangkap jabatan juga akan menguntungkan tim manajemen senior BUMN dan lebih merugikan konsumen.

ASN, TNI dan Polri sebagai institusi penyelenggara Negara harus tunduk pada peraturan lainnya salah satunya adalah UU Pelayanan Publik oleh karena BUMN dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka menurut Pasal 17 huruf a, organ BUMN yaitu direksi dan dewan komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan. Apabila terdapat anggota direksi dan anggota dewan komisaris melakukan rangkap jabatan, sesuai dengan Pasal 54 ayat (7) anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang bersangkutan akan dikenai sanksi berupa pembebasan dari jabatan.

Pengangkatan ASN dan perwira TNI-Polri dalam jajaran BUMN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

Dimana kebijakan pengangkatan sejumlah ASN bertentangan dengan pasal 5 ayat (2) UU ASN yang mengamanatkan agar ASN menjaga untuk tidak

terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya prajurit TNI aktif dalam jajaran BUMN juga bertentangan dengan Pasal 47 Ayat (1) UU TNI yang mengamanatkan prajurit TNI aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Pengaturan yang sama juga diamanatkan Pasal 28 Ayat (3) UU Polri yang menyatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dengan demikian, praktik rangkap jabatan yang terjadi di lingkungan BUMN dengan mengangkat ASN, Prajurit TNI-Polri sebagai Komisaris merupakan hal yang tidak dibenarkan dan kemungkinan terjadi pelanggaran mal-administrasi dalam kebijakan pengangkatan tersebut.

Hal tersebut juga disepakati oleh Donal Fariz selaku Koordinator bidang Korupsi Politik (*Indonesian Corruption Watch* yang selanjutnya disebut CW). Dimana Donal Fariz memandang bahwa rangkap jabatan akan menimbulkan setidaknya dua aspek masalah, yakni tata kelola pemerintahan yang baik dan politik.

Pengaturan rangkap jabatan (*interlocking directorate*) di dalam UUBUMN diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 33. Dimana Setiap organ persero dalam menjalankan tugasnya harus didasarkan pada ktikad baik (*good faith*), diharapkan dapat mencurahkan perhatiannya, pikirannya serta tenaganya secara penuh sehingga apa yang menjadi kewajibannya dalam pemenuhan tugas dapat berjalan sesuai dengan posisinya masing-masing.

Di dalam Pasal 25 dinyatakan anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi /lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau

- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan di dalam Pasal 33 dinyatakan anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari kedua pasal dalam UUBUMN di atas, sudah dapat dilihat dengan jelas bahwa, rangkap jabatan (*interlocking directorate*) merupakan sesuatu hal yang dilarang bagi anggota direksi dan anggota komisaris BUMN. Dalam Pasal 25 dan Pasal 53 UU BUMN huruf a juga disebutkan bahwa anggota direksi dan anggota komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan dalam rangka untuk menghindari adanya benturan kepentingan karena di dalam pengurusan BUMN baik anggota direksi maupun anggota komisaris wajib melaksanakan pengurusan dengan itikad baik (*good faith*) dan menghindari adanya benturan kepentingan. Tindakan pengurusan yang mengandung benturan kepentingan dikategorikan sebagai tindakan itikad buruk (*bad faith*). Sebab tindakan yang demikian melanggar kewajiban kepercayaan (*breach of his fiduciary duty*) dan kewajiban menaati peraturan perundang-undangan.⁷

Beberapa alasan tersebut bersifat praktis seperti argumen bahwa pejabat publik yang merangkap sebagai komisaris BUMN menjadi tidak fokus dalam bekerja karena beban kerjanya berlebihan sementara waktunya terbatas. Padahal dalam UU No. 19 Tahun 2003 Pasal 28 disebutkan bahwa selain diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, dan kompetensi, komisaris BUMN juga harus menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini tentu tidak mungkin, karena pada saat yang sama ia juga harus menjadi pelaksana penuh pelayanan publik yang juga membutuhkan dedikasi dan konsentrasi yang tinggi.

⁷ Muh. Yahya Harahap, Hukum Perseoran Terbatas, Sinar Grafika: Jakarta, hal.376

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (2) UU Pelayanan Publik disebutkan yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah:

setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Ketentuan yang lebih khusus terkait larangan ASN untuk merangkap jabatan terdapat dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa seorang pegawai ASN akan memiliki jabatan dalam kedudukannya, baik dalam jabatan administrasi, jabatan fungsional atau jabatan pimpinan tinggi. Adapun dalam ketentuan yang sama pasal 109 ayat (2) menentukan bahwa jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.

Selanjutnya terkait dengan Polri yang merangkap jabatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 28 ayat (3) yang menentukan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Sedangkan yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian ialah jabatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian atau tidak berdasarkan pada penugasan dari kapolri. Artinya bahwa, seorang anggota kepolisian hanya dapat menduduki satu jabatan yang apabila harus menduduki jabatan lain di luar kepolisian, maka harus mengundurkan diri terlebih dahulu atau telah pensiun dari dinas kepolisian. Begitupun dengan TNI, rangkap jabatan yang dilakukan oleh TNI juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia .

Terkait dengan rangkap jabatan yang dilakukan oleh para pelaksana pelayanan publik, masalah-masalah yang akan muncul yakni, pertama masalah moral (*moral hazard*). Masalah moral terjadi karena ada risiko bahwa pejabat publik yang ditunjuk sebenarnya tidak memiliki kapasitas, waktu, dan tenaga dalam menjalankan tugasnya mengawasi BUMN. Masalah ini khususnya muncul ketika seorang komisaris merangkap jabatan.⁸

Hal tersebut juga telah dilakukan riset melalui Universitas Stanford dan Yale. Dimana hasil riset tersebut menunjukkan bahwa orang yang mengerjakan berbagai tugas memiliki kinerja yang lebih rendah daripada mereka yang fokus menyelesaikan satu tugas pada satu waktu.

Masalah kedua yakni kerugian ekonomi akibat kurangnya informasi yang valid (*adverse selection*). Kerugian ini khususnya muncul karena kurang tersedianya rekam jejak para pejabat terkait kapasitas, waktu, dan tenaga mereka, baik pada saat perekrutan maupun selama mereka bekerja.⁹ Seperti yang diketahui, Kementerian BUMN tidak menyediakan informasi ini untuk diakses publik secara mudah, misalnya lewat situs kementerian BUMN. Masalah moral dan ekonomi ini kemudian diperburuk dengan aturan penetapan honorarium dewan BUMN yang tidak memihak pada masyarakat sebagai pengguna layanan BUMN.¹⁰

Oleh karenanya, sejalan dengan hal tersebut, penunjukan pejabat pemerintah khususnya pelaksana pelayanan publik menjadi komisaris BUMN berpotensi menyalahi peraturan. Pasal 17 huruf a Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelaksana pelayanan publik dilarang

⁸ The Conversation, Rangkap Jabatan di BUMN Adalah Masalah Bagi Keadilan Sosial, <https://theconversation.com/rangkap-jabatan-di-bumn-adalah-masalah-bagi-keadilan-sosial-142183>. 2020 (diakses pada tanggal 10 Juni 2021)

⁹ The Conversation, Rangkap Jabatan di BUMN Adalah Masalah Bagi Keadilan Sosial, <https://theconversation.com/rangkap-jabatan-di-bumn-adalah-masalah-bagi-keadilan-sosial-142183>. 2020 (diakses pada tanggal 10 Juni 2021)

¹⁰ The Conversation, Rangkap Jabatan di BUMN Adalah Masalah Bagi Keadilan Sosial, <https://theconversation.com/rangkap-jabatan-di-bumn-adalah-masalah-bagi-keadilan-sosial-142183>. 2020 (diakses pada tanggal 10 Juni 2021)

merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.

Alasan yang memperkuat larangan tersebut, yakni komisaris yang merangkap jabatan tidak akan bisa bekerja maksimal karena harus membagi waktu dan fokus. Dampaknya yakni dikorbankannya tata kelola perusahaan. Padahal, dalam Pasal 28 ayat 1 UU BUMN *juncto* Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/Mbu/02/2015, disebutkan bahwa syarat materiil untuk dipilih menjadi komisaris salah satunya ialah dapat menyediakan waktu yang cukup. Jadi semisal seorang ASN, TNI atau Polri merangkap jabatan menjadi komisaris di suatu anak perusahaan BUMN, tentunya tidak mudah untuk mengerjakan keduanya secara bersamaan karena harus menggunakan energi serta konsentrasi yang berbeda.¹¹

Dengan demikian, dibiarkannya rangkap jabatan tentunya sama saja dengan membiarkan kebijakan yang koruptif. Tidak hanya itu, rangkap jabatan tentunya akan menimbulkan konflik kepentingan. Dan jika hal ini terus dibiarkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian dalam proses perekrutan komisaris. Sehingga akan menjadikan tata kelola perusahaan menjadi buruk dan merusak kepercayaan publik.

Namun, alasan yang paling kuat dan legitim mengenai penolakan rangkap jabatan adalah karena kondisi tersebut rawan memunculkan konflik kepentingan. Berbagai peraturan yang mengatur mengenai mengenai kode etik dan sumpah jabatan ASN, TNI dan Polri telah menegaskan agar ASN, TNI dan Polri menghindari setiap kemungkinan konflik kepentingan dalam menjalankan jabatan dan pekerjaannya, baik yang diformulasikan sebagai “mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan” maupun yang secara eksplisit menyebut kewajiban PNS untuk menghindari konflik kepentingan.

¹¹ Mohammad Bernie, Masalah di Balik Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Era Jokowi, <https://tirto.id/masalah-di-balik-rangkap-jabatan-komisaris-bumn-era-jokowi-fMhx>. 2020, (diakses pada tanggal 10 Juni 2021)

Sebagai orang yang bekerja di sektor publik dan tindak tanduknya berkaitan erat dengan hajat masyarakat umum, ASN, TNI dan Polri merupakan pekerjaan yang sangat rawan dengan jebakan dan perangkap konflik kepentingan. Kepentingan publik begitu luas dan umum. Seringkali kepentingan publik tersebut berseberangan dengan kepentingan privat, entah itu kepentingan pribadi, keluarga, sejawat, kelompok, maupun golongan. Ketika keduanya berseberangan kita tentunya dituntut untuk bertindak atau membuat keputusan di tengah persimpangan tersebut, maka hadirilah konflik kepentingan secara aktual.

Konflik kepentingan merupakan sebuah konsep yang banyak digunakan untuk menelisik risiko etis dari sebuah profesi dan tindakan. Kemunculannya yang cukup pervasif berakar dari kenyataan bahwa natur manusia merupakan makhluk yang lemah dan rentan.¹²

Secara umum, konflik kepentingan muncul ketika kepentingan dari seseorang tidaklah sama dengan kepentingan dari orang lain atau organisasi di mana orang tersebut berhutang kesetiaan. Selain itu, konflik kepentingan juga dapat muncul ketika seseorang harus merespons kepentingan dari dua individu, kelompok, atau organisasi yang bertentangan satu sama lain. Jika hanya kepentingan salah satu pihak yang diakomodasi, maka kepentingan pihak yang lain tercederai.¹³

Konflik kepentingan dalam rangkap jabatan ASN dengan komisaris BUMN dimungkinkan terjadi karena dengan memegang kedua jabatan tersebut secara bersamaan, maka artinya seseorang memiliki loyalitas dan komitmen ganda. Loyalitas ganda tersebut diperparah dengan kenyataan bahwa kedua jabatan tersebut memiliki sifat yang berbeda. ASN adalah jabatan publik sehingga berorientasi kepada kepentingan publik. Adapun komisaris BUMN memiliki orientasi privat yang kuat karena dia bekerja kepada entitas yang diwajibkan untuk mencari untung. Ketidaksamaan tujuan di antara organisasi tempat pemilik

¹² N.Nikolov, *Conflict of Interest in European Public Law*, *Journal of Financial Crime*, 2013, hal.406

¹³ Ethics Unwrapped, Conflict of Interest, <http://ethicsunwrapped.utexas.edu>. 2017, diakses pada 10 Juni 2021

jabatan rangkap bekerja menjadi faktor sah di balik munculnya sebuah konflik kepentingan, terlebih ketika dua organisasi tersebut memiliki kemungkinan untuk berelasi.

Karena ada hubungan antara konflik kepentingan dan peran individu dalam suatu organisasi, konflik kepentingan akan ditentukan ketika pengaruh kepentingan inherent individu mendistorsi peran yang diharapkan organisasi untuk orang tersebut. Namun, faktor kelembagaan juga dapat memperburuk konflik kepentingan yang kompleks. Jika ada kerjasama dan kesepahaman untuk menyembunyikan, melindungi dan bahkan menggunakan konflik kepentingan yang dialami individu dalam organisasi, maka konflik kepentingan tersebut akan menjelma menjadi korupsi organisasi. Hal ini hanya dapat diprediksi dengan pemahaman bahwa konflik kepentingan tidak terisolasi, fenomena tunggal dan ganda, tetapi saling terkait, viral dan multi-stakeholder.

Para pemegang jabatan rangkap bisa saja mengelak dengan mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki konflik kepentingan dengan berbagai macam alasan: bahwa dirinya dapat memisahkan dan membedakan secara tegas fungsinya sebagai ASN dan sebagai komisaris, bahwa kedua jabatan tersebut berhubungan erat dan keberadaannya di BUMN berfungsi untuk mewakili pemerintah sebagai salah satu pemegang saham, bahwa dirinya kompeten dan profesional sehingga layak menduduki jabatan komisaris, dan sebagainya. Dari belum ditemukannya kasus korupsi akibat rangkap jabatan. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah alasan pembenar yang layak. Ketidadaan korupsi tidak mementahkan premis bahwa situasi yang berpotensi menimbulkan korupsi harus dicegah dan dilarang. Lagipula, sebagaimana teori konflik kepentingan, persepsi publik mengenai risiko konflik kepentingan atas suatu situasi karena mereka melihat adanya celah, meskipun barangkali celah tersebut sangat sempit dan tidak sepenuhnya benar, sudah cukup sebagai landasan untuk mengatakan bahwa risiko konflik kepentingan telah teridentifikasi.

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang melarang rangkap jabatan bagi penyelenggara pelayanan publik, namun tetpa saja banyak jabatan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijabat unsur pejabat negara, militer dan kepolisian. Selain keterkaitan bisnis perusahaan petinggi negara, pengangkatan komisaris dari pejabat negara, militer dan kepolisian dilakukan karena sejumlah pertimbangan. Salah satunya adanya kontribusi bagi keamanan dan kestabilan bisnis perusahaan.

Banyak pihak yang tidak mempermasalahkan adanya rangkap jabatan pejabat pemerintah yang menduduki posisi komisaris BUMN karena berbagai pertimbangan. Bahwa pertimbangan perlunya pejabat pemerintah yang menjadi komisaris BUMN adalah karena adanya kepemilikan saham pemerintah minimal 51% dalam bentuk penyertaan modal negara (*Public Service Obligation*), sehingga dibutuhkan wakil pemerintah untuk menjaga kepentingan dan kebijakan pemerintah di BUMN tersebut. Selain tu, adanya perwakilan pemerintah bertujuan untuk memastikan agar *corporate social responsibility* (CSR) berjalan sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah.

Dari aspek hukum mengenai kelembagaan di BUMN tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam penunjukan komisaris dari unsur perwira tinggi TNI-Polri (Hikmahanto Juwana: Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia).¹⁴ Hal tersebut karena dianggap bahwa tugas utama komisaris BUMN jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), yakni melakukan pengawasan. Sehingga dalam tata kelola di perusahaan berbentuk perseroan terbatas kepentingan pemilik atau pemegang saham dicerminkan dalam keanggotaan direksi dan dewan komisaris. Hal tersebut juga relatif bisa diterima apabila bisnis BUMN sesuai dengan bidang yang digeluti oleh para ASN, TNI dan Polri.

¹⁴ _____, Jenderal TNI-Polri Rangkap Komisaris BUMN Ditinjau Dari Aspek Hukum, <https://money.kompas.com/read/2020/07/01/190311926/jenderal-tni-polri-rangkap-komisaris-bumn-ditinjau-dari-aspek-hukum?page=all>. 2020, diakses pada tanggal 11 Juni 2021.

Kebijakan yang mendukung rangkap jabatan bersumber dari Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN menyatakan bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bisa berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah. Peraturan tersebut agaknya mengasumsikan bahwa ASN bukanlah jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan bagi komisaris BUMN, mengingat UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (yang merupakan salah satu landasan dari Permen tersebut) pada Pasal 33 menyebutkan bahwa komisaris BUMN dilarang merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Selanjutnya, berdasarkan peraturan tidak ada larangan implementasi rangkap jabatan, namun harus dilakukan melalui tahap seleksi atau penjurangan. Tahap seleksi yang baik harus dilakukan berdasarkan uji kelayakan pada seorang pejabat struktural yang biasanya dilakukan pada level BUMN, namun pejabat yang dimaksud harus mampu bekerja sesuai dengan harapan dan berdaya guna dalam operasional BUMD sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah.¹⁵ Artinya bahwa, pejabat negara hingga abdi negara yang diangkat menjadi komisaris, tidak masalah ketika merangkap jabatan. Hal itu dikarenakan tidak adanya larangan yang menyatakan hal tersebut. Kemudian, terkait jabatan komisaris, Komisaris itu merupakan sebuah organisasi dalam perusahaan yang berisi beberapa individu. Keputusan yang diambil harus berdasarkan kolektif kolegal. Jadi secara sistem pengaruh berlebihan individu seorang komisaris bisa dielemisir. Sehingga kekhawatiran mengenai konflik kepentingan yang akan ditimbulkan itu tidak akan terjadi.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum perdata¹⁶ tujuan utamanya mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain adalah mencari keuntungan atau

¹⁵ Tri Wahyuni, "Rangkap Jabatan" : Batas antara hukum dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Policy Paper. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LAN. 2017, hal.12-17.

¹⁶ Chaidir Ali, Badan Hukum, Alumni: Bandung, 1987, hal.19

laba.¹⁷ Pada hakikatnya suatu perseroan Terbatas memiliki dua sisi, yaitu pertama sebagai suatu badan hukum dan kedua sebagai wadah tempat diwujudkannya kerjasama antara para pemegang saham atau pemilik modal. Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.¹⁸ Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan UU PT, sebagai pemegang saham Pemerintah memiliki hak penuh untuk memilih siapapun yang memiliki kompetensi sesuai bidang BUMN tersebut sebagai Komisaris.

Selain itu sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tugas dan Fungsi utama dari Komisaris adalah sebatas pengawasan saja, tidak harus melakukan kegiatan mengurus perusahaan *day to day* atau dalam artian setiap hari. Jadi tidak akan banyak menyita waktu ASN dalam menjalankan tugasnya di instansi pemerintah tempat ia bekerja. Dengan demikian, rangkap jabatan Komisaris BUMN, juga dapat mendatangkan manfaat positif bagi pemerintah karena ada dampak simbiosis dalam jabatan rangkapnya tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peran komisaris BUMN khususnya dari unsur TNI-Polri juga diperlukan, terutama yang menyangkut hubungan dengan instansi pemerintahan. Namun, untuk memastikan kepentingan pemegang saham yakni pemerintah, maka kewenangannya didelegasikan kepada anggota dewan komisaris dan anggota direksi yang ditunjuk.

Pertimbangan diangkatnya ASN, TNI dan Polri sebagai Komisaris di BUMN diungkap oleh Wahyu Kuncoro selaku Deputy Bidang infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN.¹⁹ Hal tersebut dimaksudkan semisalnya terjadi sengketa

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2006, hal. 105

¹⁸ Erlina, Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas, Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No.2, 2017, hal.114

¹⁹ Muhammad dris, TNI/Polri Jadi Komisaris di BUMN, ini Alasannya, (interview Deputy Bidang infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN) <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3135703/tnipolri-jadi-komisaris-di-bumn-ini-alasannya>. 2016, diakses pada tanggal 11 Juni 2021

lahan atau dengan masyarakat sekitar terkait BUMN perkebunan, TNI dan Polri yang diangkat menjadi komisari BUMN tentunya akan lebih mudah untuk mengawasi dan berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial dan masalah keamanan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri BUMN-Erick Tohir juga menyatakan hal yang serupa, bahwa pemilihan pasti ada *reason*-nya, di pertambangan kadang ada konflik baik namanya soal tanah. Baik namanya perizinan yang tumpang tindih ada juga su sosial pada masyarakat kita, itu harus *balance* di masing-masing usaha ada yang ahlinya di ndustri ada, yang ahli di keuangan ada. Tapi ada juga ahlinya untuk social.²⁰ Oleh karena itu, pertimbangan diangkatnya para pelaksana pelayanan publik sebagai komisaris BUMN untuk menyeimbangkan BUMN sendiri.

Selain itu, dalam Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (PKSANHAN)²¹, bahwa pertimbangan perlunya pejabat pemerintah yang menjadi komisaris BUMN adalah karena adanya kepemilikan saham pemerintah minimal 51% dalam bentuk penyertaan modal negara (*Public Service Obligation*), atas dasar pertimbangan untuk menjaga kepentingan dan kebijakan pemerintah di BUMN tersebut maka dibutuhkan wakil pemerintah. Kemudian, adanya perwakilan pemerintah bertujuan untuk memastikan agar *Corporate Social Responsibility* (CSR) berjalan sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah.

BUMN pada dasarnya sejalan dengan Prof Arifin yang mengatakan bahwa BUMN/BUMD adalah badan hukum perdata tanpa kekuasaan publik. Kekayaan nasional dan daerah yang menjadi modal berupa saham badan hukum bukan lagi

²⁰ Erick Tohir (Narasumber) terkait pengangkatan TNI hingga Polri di BUMN oleh CNBC Indonesia pada 12 Juni 2020, pukul 14:50 (Konferensi Pers Virtual) dalam artikel Anisatul Umrah & Monica Wareza, Rangkul TNI Hingga Polri di BUMN, ini Jawaban Erick Tohir, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200612141332-17-164941/rangkul-tni-hingga-polri-di-bumn-ini-jawaban-erick-thohir>, 2020, diakses pada tanggal 11 Juni 2021.

²¹ Tri Atmojo Sejati, Menyoal Profesionalisme PNS yang Merangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN dan BUMD, Policy Brief : Pusat Kajian Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara (PKSANHAN) No. 007/DKK.PB, <https://dkk.lan.go.id>, diakses pada tanggal 11 Juni 2021

kekayaan negara atau daerah, tetapi telah berubah status hukumnya dan menjadi kekayaan badan hukum. Jika seorang pejabat pemerintah menjabat sebagai komisaris, kekebalan publiknya sebagai penguasa/pejabat tidak lagi berlaku dan tunduk sepenuhnya berlaku untuk hukum privat.²²

Meskipun dengan berbagai pertimbangan seperti yang dikemukakan di atas, Praktik pejabat publik yang merangkap sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara tidak dapat diperbolehkan begitu saja karena dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena pemerintah sebagai regulator harus independen, tetapi sebagai komisaris di BUMN, status regulator independen sulit dicapai. Lembaga pemerintah sebagai lembaga publik dan BUMN sebagai badan swasta, tidak mungkin untuk mengelola dan merumuskan kebijakan dalam bentuk dua badan hukum yang berbeda kecuali jika dipaksa untuk menciptakan konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 yang merupakan peraturan menteri pengganti PER-02/MBU/02/2015 BAB V huruf B disebutkan bahwa anggota dewan komisaris dilarang merangkap jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk merangkap jabatan kecuali jika bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih menjadi Dewan Komisaris BUMN.

Beberapa ketentuan hukum lain juga melarang posisi rangkap jabatan, yaitu melarang pejabat tinggi publik dari lembaga pemerintah sekaligus sebagai komisaris BUMN. Rangkap jabatan tersebut dua kali lipat dapat melanggar penerapan prinsip umum pemerintahan yang baik, karena dengan dua posisi otoritas ini, peluang penyalahgunaan kekuasaan memungkinkan dapat terjadi. Larangan rangkap jabatan tersebut khususnya terdapat dalam UU ASN, UU TNI dan UU Polri. Sejalan dengan penjelasan pada paragraf sebelumnya, dapat

²² Arifin P. Soeria Atmadja, Format Fungsi Publik Pemerintah dan Badan-Badan Hukum, dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers: Jakarta, hal.84

disimpulkan bahwa ASN, TNI dan Polri dilarang memangku jabatan rangkap kecuali para pihak yang terkait bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatannya ketika terpilih menjadi Dewan Komisaris di BUMN. Oleh karena itu, praktik rangkap jabatan telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada. Mengingat kedudukan Peraturan Menteri bersifat mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011. Artinya, peraturan menteri berada di bawah peraturan presiden sedang peraturan presiden berada di bawah Undang-Undang/ Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, peraturan menteri tidak boleh menyalahi undang-undang. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum yang bersifat hierarkis sehingga norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi. Namun, hal tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut untuk memperjelas kedudukan peraturan menteri dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

B. Akibat Hukum Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris BUMN

Untuk menjamin tercapainya tujuan UUD 1945 perihal etika ASN, TNI dan Polri dalam rangkap jabatan, maka diperlukan apartur sipil negara dan abdi negara yang berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna. Dasar pertimbangan ditetapkan pembinaan jiwa korps dan kode etik profesi ASN, TNI dan Polri adalah untuk melahirkan ASN, TNI dan Polri yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, netral, profesional dan bertanggungjawab melaksanakan tugasnya, serta penuh kesetiaan pada Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah.²³ Dengan demikian, apabila kode etik tersebut dilanggar, tentu dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tidak tumpang tindih agar negara tidak gagal dalam menanggapi su dan kontra rangkap jabatan dari ketiga unsur pelaksana pelayanan publik tersebut. Pendisiplinan diperlukan guna

²³ Adhyaksa Dault, 2012, *Menghadang Negara Gagal*, Renebook, Jakarta, hal. 65

memperkuat amanat yang telah diberikan negara melalui peraturan perundang-undangan.

Pengertian disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman, meskipun arti yang sesungguhnya tidaklah demikian. Disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat yang berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat²⁴

Dari hasil penelitian penulis, setidaknya-tidaknya ada tujuh undang-undang dan dua peraturan perundang-undangan yang menyebutkan secara eksplisit mengenai larangan rangkap jabatan pejabat publik dan abdi negara sebagai komisaris BUMN, yaitu:

1. Pertama, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, khususnya Pasal 33 yang berbunyi anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kedua, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 17 yang melarang pelaksana pelayanan publik merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha. Menurut beberapa pandangan dari para ahli dan pengamat politik, larangan tersebut diberlakukan bagi pelaksana pelayanan publik yang berasal dari instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.
3. Ketiga, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pasal 5 ayat (2) huruf (h) yang menyatakan ASN wajib menjaga kode etik agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

²⁴ Heru Susanto, 2011, *The Power of Discipline: Kekuatan untuk Bertahan di Badai Krisis dan Meningkatkan Apa Pun yang Anda inginkan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 2.

4. Keempat, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 42-43. Intinya, para pejabat yang terlibat dalam konflik kepentingan dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
5. Kelima, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, khususnya Pasal 5 poin (6) tentang larangan rangkap penghasilan. Oleh karena itu, adanya gaji ganda akan berpotensi melanggar UU 28/1999.
6. Keenam, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia , khususnya Pasal 47 ayat (1) yang melarang tentara aktif menduduki jabatan-jabatan sipil.
7. Ketujuh, UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , terutama Pasal 28 ayat (3) yang menyebut anggota kepolisian hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas.
8. Kedelapan, PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, terutama Pasal 54 yang melarang terjadinya rangkap jabatan.
9. Kesembilan, PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Pasal 48 ayat (1) yang menyebutkan,:

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris”.

Sedangkan ayat (2) menyebutkan:

“Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.”

Larangan rangkap jabatan dalam undang-undang tersebut mengindikasikan potensi terjadinya konflik kepentingan atau benturan kepentingan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 33 UU BUMN. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas tersebut sudah semestinya ASN, TNI, dan Polri menjadikan beberapa undang-undang di atas khususnya UU Pelayanan Publik sebagai rujukan. Menurut UU Pelayanan Publik larangan untuk rangkap

jabatan termasuk salah satu prasyarat agar pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dapat terwujud dan benturan atau konflik kepentingan dapat dihindari.

Selanjutnya, pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Dari bunyi pasal tersebut, jelas bahwa prajurit yang masih aktif tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan sipil.

Kemudian, larangan bagi Polri diatur pada pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Serupa dengan TNI, anggota Polri diperbolehkan menduduki jabatan di luar kepolisian apabila telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian sebagai berikut:

yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

Perlu diketahui pula, anggota TNI/POLRI tersebut tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan tersebut sejalan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian hal yang sama juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang merupakan turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 23(1) huruf d

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu pula, anggota TNI yang masih aktif pun dilarang untuk melakukan kegiatan bisnis tertuang pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ,

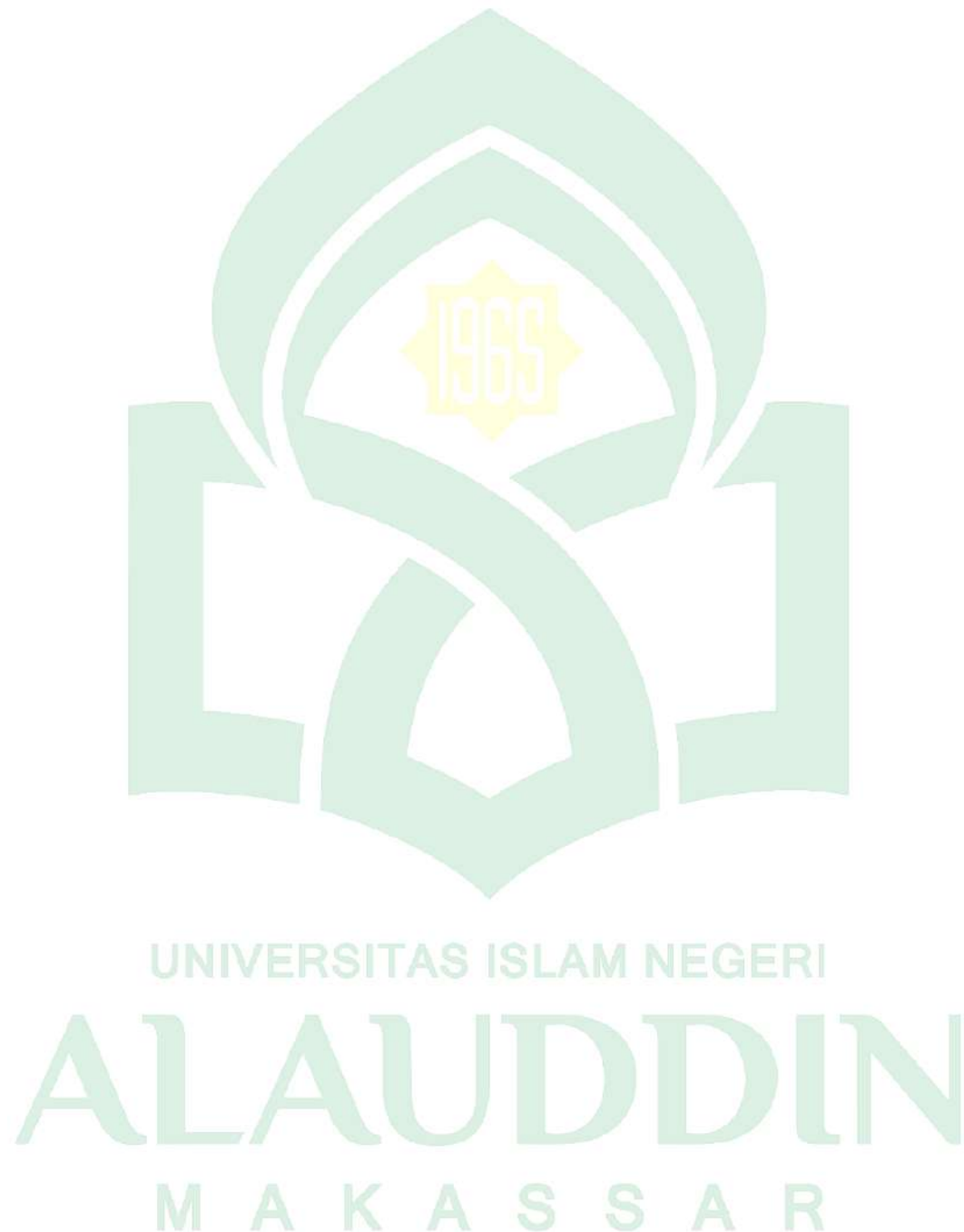
Prajurit dilarang terlibat dalam: kegiatan menjadi anggota partai politik; kegiatan politik praktis; kegiatan bisnis; dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Larangan ini berarti selama anggota TNI masih menjadi anggota aktif TNI, para anggota dilarang berwirausaha. Sementara itu, Pasal 5 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang sejumlah larangan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif demi memelihara kehidupan negara dan masyarakat, dilarang untuk memiliki saham/modal dalam suatu perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam kekuasaannya.

Dengan demikian, penekanan larangan tersebut lebih kepada pencegahan kemungkinan terjadinya KKN antara perusahaan yang di dalamnya terdapat anggota Polri dengan instansi kepolisian. Jika ditelaah dari bunyi pasal tersebut, tidak ada larangan bagi anggota Polri yang masih aktif, baik untuk menjadi pemegang saham dalam perusahaan swasta nasional ataupun menjadi komisaris atau direksi perusahaan lain yang tidak berhubungan dengan Polri.

Berdasarkan penjelasan di atas melalui pengumpulan bahan-bahan literasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dan kode etik profesi, penulis menemukan bahwa larangan rangkap jabatan di lingkup ASN, TNI dan Polri tidak diperbolehkan. Hal tersebut dapat merusak profesionalitas para pelaksana pelayanan publik untuk menjalankan tugasnya sesuai yang diamanatkan

oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Dimana akibat hukum yang ditimbulkan yakni pemberhentian dari jabatan atau mengundurkan diri. Selanjutnya akan diadakan sidang kode etik bagi masing-masing instansi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan di BAB IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan diangkatnya ASN, TNI dan Polri sebagai komisaris di BUMN adalah karena dibutuhkan kontribusi bagi keamanan dan kestabilan bisnis perusahaan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan tugas komisaris ialah melakukan pengawasan sehingga kemungkinan terjadinya konflik kepentingan tidak akan terjadi. Pertimbangan lainnya, yakni karena adanya kepemilikan saham pemerintah sekitar 51% dalam bentuk penyertaan modal negara (*Public Service Obligation*), oleh karenanya dibutuhkan wakil pemerintah untuk menjaga kepentingan dan kebijakan serta memastikan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berjalan sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah. Untuk itu, ASN, TNI dan Polri yang kapabel dibutuhkan untuk mengisi posisi komisaris di BUMN. Namun, tetap saja hal tersebut harus tetap dikawal dan terus dikaji karena peraturan perundang-undangan yang ada masih saling berbenturan.
2. Akibat hukum diangkatnya ASN, TNI dan Polri menjadi komisaris BUMN, yakni harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya. Hal tersebut sesuai dengan beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah Larangan rangkap jabatan tersebut sebagaimana telah tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia , UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

B. Saran

Setelah memberikan kesimpulan penulis ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus melihat kembali peraturan-peraturan yang mengizinkan dan melarang rangkap jabatan dan kemudian merevisinya dan memastikan rangkap jabatan dilarang ataukah diperbolehkan, membuat ketentuan atau kebijakan agar pejabat publik melepaskan salah satu dari kedua jabatan tersebut yaitu memilih sebagai komisaris BUMN atau sebagai pejabat publik dan penyelenggara pelayanan publik.
2. ASN, TNI dan Polri yang merangkap sebagai komisaris BUMN tersebut sebaiknya tidak dilakukan, hal tersebut dimaksudkan untuk membenahi integritas pejabat publik khususnya pelaksana pelayanan publik agar tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat tidak hilang. Oleh karena itu beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan seperti : ASN, TNI dan Polri sebagai pejabat publik dan penyelenggara pelayanan publik yang menduduki posisi komisaris BUMN sebaiknya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh peraturan perundangan-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Al-Sulthaniyyah, Al-Mawardi al Ahkam. 2017. *alih bahasa Khalifurrahman Fath & Fathurrahman*, cet.2, Jakarta:Qisthi Pers.
- Atmadja, Arifin P Soeria. 2010. *Format Fungsi Publik Pemertintah dan Badan-Badan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dault, Adhyaksa. 2012, *Menghadang Negara Gagal*. Jakarta:Renebook
- Mahfud, Mohammad. 2018. *Politik Hukum di Indonesia* . Depok:Rajawali Pers.
- Marsono, Sastra Djatmika. 1995. *Hukum Kepegawaian di Indonesia* , , Jakarta:Djambatan.
- Muchsan. 1982. *Hukum Kepegawaian: Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Suatu Tinjauan dari Segi Yuridis)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muh. Yahya Harahap, *Hukum Perseoran Terbatas*, Sinar Grafika: Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Perusahaan Indonesia* . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminata, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , 1986., Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasojo, Eko. 2009. *Reformasi Kedua (Melanjutkan Estafet Reformasi)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Rukmini, Mimin dan Hamid Abidin. 2004. *Kritik dan Otokritik LSM*. Jakarta:Piramedia

Susanto, Heru. 2011. *The Power of Discipline: Kekuatan untuk Bertahan di Badai Krisis dan Meningkatkan Apa Pun yang Anda nginkan*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Waicaksono, Frans Satrio. 2009. *Tanggung Jawab Pemegang Saham Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*. Jakarta:Visimedia.

Yakup, Bahrul Imi. *Dekonstruksi dan Reformulasi Hukum BUMN di Indonesia ; Upaya Menciptakan BUMN Kesejahteraan Rakyat*. Yogyakarta: Genta Publishing

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Danendra, da Bagus Kade 2017. *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia* . Lex Crimen Vol.I, No.4

Erlina. 2017. *Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas*. Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No.2

Erlina. 2017. *Prinsip Good Corporate Governance pada Perseroan Terbatas. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.4. No.1

Firmansyah, Riski. 2018. *Tinjauan Yuridis Pengaturan Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Atau Dewan Pengawas di BUMN*. Universitas Brawijaya.

Jumadi. 2017. *Negara Hukum dan Pembangunan Nasiona Berwawasan Hukum, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.4 No.1.

Kahpi, Ashabul. 2017. *Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca Tap MPR No.1/MPR/2003. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.4 No.2

Kelana, Momo. 1972. *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif, PTIK..* Jakarta.

Muzayanah, 2020. *Pemahaman Terhadap Tanggungjawab, Hak dan Kewajiban Pegawai Terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol.6 No.1

Nikolov, N. 2013. *Conflict of Interest in European Public Law*. Jurnal of Financial Crime Vol.20 No.4.

Safriani, Andi. 2017, *Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.4 No.2

Safriani, Andi. 2020. *Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Jurisprudentie Vol.7 No.1

Wulansari, Eka Martiana. *Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Paska Reformasi*. Jurnal Rechts Vinding.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Internet

_____. 2020. *Jenderal TNI-Polri Rangkap Komisaris BUMN Ditinjau Dari Aspek Hukum*. <https://money.kompas.com/read/2020/07/01/190311926/jenderal-tni-polri-rangkap-komisaris-bumn-ditinjau-dari-aspek-hukum?page=all>.

- Bernie, Mohammad. 2020. Masalah di Balik Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Era Jokowi. <https://tirto.id/masalah-di-balik-rangkap-jabatan-komisaris-bumn-era-jokowi-fMhx>.
- Chairil, Tangguh. 2020. TNI-POLRI Aktif Rangkap Jabatan: Problematika. <https://ir.binus.ac.id/2020/07/06/tni-polri-aktif-rangkap-jabatan-problematik>.
- Ethics Unwrapped. 2017. Conflict of nterest. <http://ethicsunwrapped.utexas.edu>.
- Fatimah, Siti. 2020. 2019: 397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan. <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan-pada-2019>.
- Idris, Muhammad. 2016. TNI/Polri Jadi Komisaris di BUMN, ini Alasannya. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3135703/tnipolri-jadi-komisaris-di-bumn-ini-alasannya>.
- Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN. 2016. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3135703/tnipolri-jadi-komisaris-di-bumn-ini-alasannya>.
- Majalah Gatra, “Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia , Draft Pedoman Pengawasan Persaingan Usaha di Sektor Telekomunikasi, <http://www.gatra.com/artukel.php?id=217607>.
- Redaksi, Tim. 2020. *nilah 62 Pejabat/ASN yang Rangkap Jabatan Komisaris BUMN*. <https://www.katta.id/news/2020/07/06/7505/inilah-62-pejabat-asn-yang-rangkap-jabatan-komisaris-bumn>.
- Sejati, Tri Atmojo. *Menyoal Profesionalisme PNS yang Merangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN dan BUMD*. Policy Brief : Pusat Kajian Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara (PKSANHAN) No. 007/DKK.PB, <https://dkk.lan.go.id>.
- The Conversation. 2020. *Rangkap Jabatan di BUMN Adalah Masalah Bagi Keadilan Sosial*, <https://theconversation.com/rangkap-jabatan-di-bumn-adalah-masalah-bagi-keadilan-sosial-142183>.

Thoha, Miftah. 2016. *Konsep Perubahan UU Kepegawaian, Kantor Kota Sukabumi Management Kepegawaian Universitas Gajah Mada.*
<https://sukabumikota.kemenag.go.id>.

Wareza, Monica & Anisatul Umrah. 2020. *Rangkul TNI Hingga Polri di BUMN, ini Jawaban Erick Tohir.*
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200612141332-17-164941/rangkul-tni-hingga-polri-di-bumn-ini-jawaban-erick-tohir>.

Lain-lain

Adrie, *Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian*, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai.

Ali, Chaidir. 1987. *Badan Hukum*. Bandung:Alumni

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia

Natiya, *Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak)*. Skripsi

Peraturan Kapolri No.Pol.7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri

Putri, Elfina Yuliati. *Kedudukan Hak Dan Kewajiban Pegawai Negeri*, Universitas Ekasakti (Makalah)

Wahyuni, Tri. 2017. *“Rangkap Jabatan” : Batas antara hukum dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan*. Policy Paper. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LAN.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 615 Tahun 2021

T E N T A N G

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI TAHUN 2021

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** :
- N A M A : Ahmad Wahyudi
 - N I M : 10400117096
 - Jurusan : Ilmu Hukum
 - Hari/Tanggal : Senin, 19 April 2021
 - Prihal : Ujian Seminar Proposal Skripsi
 - Judul : "Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara."
- Menimbang** :
- a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Proposal Penelitian Skripsi;
 - b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji Seminar Proposal Penelitian Skripsi
 - c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut
- Ketua : Dr. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.
 - Sekretaris : Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
 - Penguji I : Erlina, S.H., M.H.
 - Penguji II : Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H
 - Pelaksana : 1. Nehru, S.Pdi
 - 2. Herawati, S.H.
- Kedua** :
- Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Ketiga** :
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2021
- Keempat** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Romang Polong

Pada tanggal : 15 April 2021

An-Rektor

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Pemrakarsa	Kasubag Akademik



MUAMMAR MUHAMMAD BAKRY

Tembusan : Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa; (Sebagai Lampiran)

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 916 Tahun 2021**

**TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL SKRIPSI TAHUN 2021**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** :
- Surat Permohonan : N A M A : Ahmad Wahyudi
 - N I M : 10400117096
 - Jurusan : Ilmu Hukum
 - Hari/Tanggal : Senin, 05 Juli 2021
 - Prihal : Ujian Seminar Hasil Skripsi
 - Judul : "Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara".
- Menimbang** :
- a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil Penelitian/Skripsi;
 - b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji Seminar Hasil Penelitian/Skripsi
 - c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil /Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Dr. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.
 - Sekretaris : Tri Suhendra Arbani, S.H., M.H
 - Penguji I : Eriana, S.H., M.H.
 - Penguji II : Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H.
 - Pelaksana : 1. Nehru, S.Pd.i
 - 2. Herawati, S.H.
- Kedua** :
- Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
- Ketiga** :
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2021;
- Keempat** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Romang Polong
Pada tanggal : 02 Juli 2021



MUAMMAR MUHAMMAD BAKRY

Tembusan :
- Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa; (Sebagai Lampiran

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 639 Tahun 2021

TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSITAHUN 2021

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :



- Membaca** :
- Surat Permohonan : Ahmad Wahyudi
 - NIM : 10400117096
 - Jurusan : Ilmu Hukum
 - Hari/Tanggal : Senin, 16 Agustus 2021
 - Perihal : Ujian Munaqasyah /Skripsi
 - Judul : "Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI dan Polri Menjadi Komisaris di BUMN
- Mengingat** :
- b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
 - c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Dr. H. Muammar Muhammaad Bakry, Lc., M.Ag.
 - Sekretaris : Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd.
 - Penguji I : Erlina S.H., M.H.
 - Penguji II : Ashabul Kahfi S.Ag., M.H.
 - Pelaksana : Mujahidah, S.E
- Ketiga** :
- Segala biaya yang timbul akibat ditebitkannya Surat Keputusan ini dibeban kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2021;
- Keempat** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Romang Polong
Pada tanggal : 12 Agustus 2021



Muammar Muhammad Bakry

Pemrakarsa	Kasubag Akademik
	

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 489 Tahun 2021

T E N T A N G
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAFT/ SKRIPSI TAHUN 2021

- Menimbang : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : a. Menunjuk saudara : 1. Dr. Andi Safriani, S.H., M.H.
2. Istiqamah, S.H., M.H.

Sebagai pembimbing mahasiswa :

N a m a : Ahmad Wahyudi
N I M : 10400117096
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : "Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI dan POLRI menjadi Komisaris BUMN".

- b. Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2021;
d. Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Romang Polong
Pada tanggal : 12 Maret 2021

An. Rektor



DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

MUHAMMAD MUHAMMAD BAKRY

Pemrakarsa	Kasubag Akademik
	

RIWAYAT HIDUP



Ahmad Wahyudi, lahir di Biring Balang, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 19 Juni 1999. Anak pertama dari buah kasih pasangan Ayahanda **Makkawaru** dan Ibunda **Mariani**. Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada tahun 2005 di Sekolah Dasar (SD) Inpres Tambolongan Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar dan selesai pada tahun 2011. Di tahun yang sama, Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Bontosikuyu dan selesai pada tahun 2014. Selanjutnya, di tahun yang sama, Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Benteng dengan mengambil jurusan IPS dan selesai pada tahun 2017.

Di tahun 2017, Penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi negeri Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan Alhamdulillah selesai pada tahun 2021

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul **“Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI dan POLRI Menjadi Komisaris di BUMN”**.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R